



**KEPUTUSAN DONALD TRUMP TENTANG PENGAKUAN
YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL**

*(DONALD TRUMP'S DECISION ON RECOGNITION OF JERUSALEM AS THE
CAPITAL OF ISRAEL)*

SKRIPSI

Oleh

LADIA AISAH ANDRIANA

NIM 140910101026

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

**KEPUTUSAN DONALD TRUMP TENTANG PENGAKUAN
YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL**

*(DONALD TRUMP'S DECISION ON RECOGNITION OF JERUSALEM AS THE
CAPITAL OF ISRAEL)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

LADIA AISAH ANDRIANA

NIM 140910101026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Kepada hambaNya, atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, serta menjadi sandaran utama dalam hidup ini.
2. Kedua orang tua, anggota keluarga penulis; Mas Dizar, Mbak Ria, Adek Zahra dan keluarga kosan Halmahera Bunda Faiz, Bu Guru Mira, Bu Guru Putri dan Lugas atas dukungan penuh dan perhatian yang tulus, serta doa-doa yang tidak pernah terputus dalam mengiringi penulisan karya ilmiah ini.
3. Sahabat-sahabat teman seperjuangan penulis tercinta; Luthfiatul Udhma, Kamiliya Atikah, Nunik Zulfiyah, Dwi Ananda Violita, Yurike Salzabella, dan Ayuning Dwi yang telah meluangkan waktu, tenaga, keikhlasan hati, dan pikiran untuk saling menguatkan, merajut mimpi dan kenangan bersama, serta menjadi penghibur bagi penulis selama menempuh pendidikan semasa perkuliahan dan sepanjang proses pengerjaan skripsi. *Thankyou for always supporting me gurls!*
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan dikembangkan kedepannya.

MOTO

Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu:
“Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”
(terjemahan Surat *Al-Isra* ayat 4)*

* Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-'Alim: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ladia Aisah Andriana

NIM : 140910101026

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “KEPUTUSAN DONALD TRUMP MENGAKUI YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 3 Desember 2018

Yang menyatakan,

Ladia Aisah Andriana

NIM 140910101026

SKRIPSI

**KEPUTUSAN DONALD TRUMP TENTANG PENGAKUAN
YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL**

Oleh

LADIA AISAH ANDRIANA

NIM 140910101026

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy S.Sos, MA.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Donald Trump Tentang Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Desember 2018
Waktu : 12.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP. 196810221993031002

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 195904231987021001

Honest Dody Molasy S.Sos, MA.
NIP. 197611122003121002

Anggota I

Adhiningasih P. S.Sos, M.Si
NIP. 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Keputusan Donald Trump Tentang Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel ; Ladia Aisah Andriana ; 140910101026; 2018; 65 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Konflik antara Palestina dengan Israel merupakan salah satu agenda penting dari politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini di buktikan dengan berbagai kebijakan yang di lakukan Amerika Serikat dalam merespon konflik Palestina dengan Israel tersebut. Amerika Serikat sendiri telah memprakarsai berbagai perjanjian damai antara Palestina dengan Israel, yang dimulai dengan Perjanjian Oslo I pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton tahun 1993 hingga melalui mekanisme negosiasi langsung yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama. Amerika Serikat sendiri sejauh ini telah menjadi tumpuan bagi pihak-pihak negara yang berkonflik, untuk memperoleh jalan keluar. Konflik antara Palestina dan Israel sendiri bermula pasca Inggris melepaskan tanggung jawab terhadap keputusannya membagi wilayah Palestina terhadap bangsa Arab dan Yahudi yang tertera dalam perjanjian Balfour. Konflik tersebut juga disebabkan adanya perebutan wilayah penting yaitu Yerusalem yang di klaim oleh masing-masing negara menjadi wilayah yuridiksinya, dan menajdi Ibukota masa depan bagi Palestina dan Israel. Namun demikian, berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat tersebut memperoleh kegagalan, hal ini berkaitan dengan sikap Amerika Serikat yang lebih berpihak pada Israel. Keberpihakan Amerika Serikat pada Israel semakin jelas dengan deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2017, terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Hal ini tentu bertolak belakang dari upaya yang dilakukan Amerika Serikat selama ini, untuk mengupayakan perdamaian antara Palestina dengan Israel. Keputusan pengakuan wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel merupakan keputusan besar yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya, sehingga adanya keputusan tersebut menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengamati kenyataan empirik dari suatu fenomena untuk menarik suatu kesimpulan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data-data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari undang-undang, yaitu konstitusi Amerika Serikat yang mendasari keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai data sekunder seperti buku, jurnal, dan berita-berita politik internasional yang menyoroti tentang pengakuan wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel oleh Presiden Donald Trump. Untuk menganalisa permasalahan, penulis menggunakan konsep *rational choice*, dalam hal yang mempengaruhi pertimbangan Presiden Donald Trump untuk membuat keputusan.

Hasil penelitian yang didapat dengan menjabarkan secara historis konflik Palestina-Israel, dan menjabarkan pengaruh Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel tersebut, menunjukkan bahwa adanya Keputusan pengakuan wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel merupakan ketentuan yang telah diatur berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Selain itu kepentingan nasional Amerika Serikat juga menjadi pertimbangan pilihan rasional Presiden Donald Trump dalam mengambil keputusan.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh hambaNya yang dirahmati. Atas izin, karunia dan limpahan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keputusan Donald Trump Tentang Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel”** ini dalam rangka mencapai gelar pendidikan Strata Satu (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Atas bantuan yang tulus, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Honest Dody Molasy S.Sos, MA selaku dosen pembimbing II atas kesabaran dan keikhlasan beliau berdua selama ini untuk meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen anggota komisi bimbingan yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
4. Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen anggota komisi bimbingan bersama Drs. Djoko Susilo, M.Si, yang telah memberikan perhatian kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas semua ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh guru dari pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA atas kontribusinya memberikan ilmu kepada penulis.
7. Ayah Andi Wardhana dan Ibunda Faidatus Safina, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis baik itu spiritual

maupun materiil, do'a tanpa putus, dan selalu menjadi kekuatan bagi penulis di setiap langkah menyelesaikan skripsi.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNEJ khususnya angkatan 2014 yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi, atas semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat erat.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis atas kontribusinya dalam mewujudkan skripsi ini.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyempurnakan skripsi ini dan menjadikanya lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi kemajuan akademik kedepannya.

Jember, 3 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN	iii
MOTO..	iv
PERNYATAAN	v
SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.2.1 Batasan Materi.....	5
1.2.2 Batasan Waktu.....	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Dasar Konseptual.....	6
1.6 Argumen Utama	10
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.7.2 Metode Analisis Data.....	11
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. PANDANGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG KONFLIK PALESTINA DENGAN ISRAEL	13
2.1 Sejarah Konflik Palestina dengan Israel	13
2.2 Yerusalem Sebagai Titik Konflik Palestina dengan Israel	19

2.3 Sudut Pandang Amerika Serikat terhadap Konflik Palestina dengan Isarel	20
BAB 3. KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA DENGAN ISRAEL.....	25
3.1 Pada Masa Kepemimpinan Presiden Bill Clinton	25
3.1.1 Perundingan Oslo I.....	28
3.1.2 Perundingan Oslo II.....	29
3.1.3 <i>The Wye River Memorandum</i>	31
3.1.4 <i>Camp David Summit 2000</i>	32
3.2 Pada Masa Kepemimpinan Presiden George W. Bush	34
3.2.1 <i>The Road Map</i>	35
3.2.2 <i>Annapolis Conference</i>	37
3.3 Pada masa Kepemimpinan Presiden Barrack Obama	38
3.3.1 <i>Direct Negotiation Between Israel and Palestinians</i>	39
3.4 Pada masa Kepemimpinan Presiden Donald Trump	41
BAB 4. RASIONALITAS KEPUTUSAN PRESIDEN DONALD TRUMP MENGAKUI YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL	43
4.1 Merealisasikan <i>Jerusalem Embassy Act 1995</i>	44
4.2 Peta Politis di Timur Tengah	51
4.3 Faktor Arab Saudi	55
BAB 5. KESIMPULAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR SINGKATAN

AIPAC	: <i>American Israel Public Affairs Committee</i>
FRD	: <i>The Further Redeployments</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
NSC	: <i>National Security Council</i>
PAC	: <i>Political Action Committee</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PLO	: <i>Palestine Liberation Organization</i>
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency</i>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Palestina dengan Israel merupakan masalah utama yang mempengaruhi stabilitas kawasan di Timur Tengah. Konflik yang terjadi sejak Perang Dunia I ini bermula dari adanya pembagian wilayah yang dijanjikan Inggris terhadap kedua bangsa yaitu Arab dan Yahudi yang tertera dalam perjanjian Balfour (Detik, 2017). Hingga saat ini, permasalahan yang terjadi antara Palestina dan Israel menjadi perhatian PBB sebagai Organisasi Internasional dan negara-negara dunia termasuk negara adidaya Amerika Serikat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi berabad-abad tersebut, namun langkah perdamaian agaknya masih sulit direalisasikan.

Perjanjian Oslo I merupakan perjanjian damai yang pertama kali dilakukan oleh pihak Palestina dengan Israel. Perjanjian damai atas prakarsa Amerika Serikat tersebut tidak dapat berjalan lancar, hal ini disebabkan perjanjian tersebut tidak mewakili kepentingan sebagian kelompok di Palestina, yaitu seperti kelompok Jihad Islam dan Hamas. Selain itu, hambatan lain terjadi karena secara *de facto* Amerika Serikat mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk merundingkan tuntutan-tuntutannya, akan tetapi Amerika Serikat tidak mengenakan sanksi berat pada terhadap salah satu pihak yakni Israel yang kerap melanggar perjanjian yang telah di sepakati (KOMPAS, 2012). Hal ini menandakan perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan pihak Israel.

Amerika Serikat sebagai salah satu mediator dalam konflik Palestina dengan Israel, banyak menuai perhatian karena dirasa tidak netral. Hal ini dapat dikaitkan dengan posisi Israel yang merupakan sebuah aset strategis. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, kaum Yahudi sendiri menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan seperti, *National Security Council*, Departemen Luar Negeri, Intelejen, sampai pada tingkat Kongres (Detik, 2017). Oleh karena itu, kandidat Presiden Amerika Serikat selalu berhubungan dengan kepentingan

politik Israel, dalam berbagai kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, terlihat jelas bahwa komitmen Amerika Serikat yang utama adalah mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya sebagai mitra khusus. Status istimewa yang di terima Israel tersebut diwujudkan dalam pemberian dukungan dari segi politik, ekonomi, dan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat. Hal tersebut memperjelas sikap Amerika Serikat dalam konflik Palestina dengan Israel yang cenderung memihak pada sekutunya Israel. (BBC Indonesia, 2017).

Amerika Serikat sejauh ini merupakan tumpuan satu-satunya bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk memperoleh jalan keluar atas konflik berkepanjangan tersebut. Namun tampaknya kepercayaan salah satu pihak, yaitu pihak Palestina untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian konflik tersebut pupus. Hal ini disebabkan keberpihakan Amerika yang condong terhadap Israel terlihat jelas dan berujung pada deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Deklarasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Donald Trump dan juga terkait dengan rencana pemindahan Kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem (Bloomberg, 2017). Keputusan Donald Trump tentu menuai kontroversi di kalangan Internasional, dan banyak negara yang menentang terhadap keputusan sepihak yang diambil oleh Amerika Serikat. Hal ini terkait pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Resolusi (DK PBB) No. 478 tahun 1980 yang menentang Israel untuk menghidupkan kembali aturan hukum Israel yang ingin mengubah status Yerusalem, dalam resolusi ini juga meminta pada semua negara yang akan dan telah mendirikan kantor misi diplomatik di Yerusalem untuk pindah dari wilayah tersebut. Pertentangan tersebut diwujudkan dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait himbuan agar Amerika Serikat mencabut pernyataan yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel (CNN, 2017). Hal ini terbukti dari hasil voting yang dilakukan Majelis Umum PBB mengenai resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB, sebanyak 128 negara menyetujui resolusi tersebut. Adapun sembilan negara menolak dan 35

negara memilih abstain (Detik, 2017). Namun demikian, penolakan tersebut ditentang oleh Amerika Serikat dan tetap bersikeras terhadap keputusannya. Pertentangan yang dilakukan Amerika Serikat juga berujung terhadap kebijakan Trump yang berencana akan memotong anggaran bantuan PBB dan juga negara-negara yang menyetujui resolusi tersebut (Jawapos, 2017). Selain itu Amerika Serikat juga membekukan anggaran UNWRA² yakni badan PBB yang menangani bantuan bagi Palestina senilai US\$65 (setara dengan Rp865 miliar). Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Amerika Serikat ingin menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel pasca deklarasi Trump tersebut. Pernyataan lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengejutkan yakni mengatakan bahwa negara yang tidak setuju dengan keputusan tersebut maka akan menjadi musuh Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat tidak segan untuk menarik bantuan bagi negara-negara yang menentang keputusan tersebut.

Pasca deklarasi Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, menimbulkan adanya masalah-masalah baru yakni dengan meningkatnya ketegangan di negara Timur Tengah. Dampak dari keputusan tersebut juga berimbas pada perlawanan Timur Tengah seperti Negara Yordania dan Mesir, dimana dalam kunjungannya yang ketiga, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke negara Timur Tengah tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Hal ini karena mendapat penolakan dari pihak Palestina dan dari pihak Kristen di negara Mesir, selain itu Raja Yordania Abdullah juga secara terus terang mengatakan bahwa wilayah Yerusalem Timur merupakan wilayah Palestina dimasa depan, dan juga Raja Abdullah berharap bahwa Amerika Serikat tidak gegabah dalam

²UNWRA: United Nations Relief and Works Agency , merupakan sebuah badan pembangunan bantuan manusia. UNRWA bertugas untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial bagi pengungsi Palestina. UNRWA juga menjadi satu-satunya badan yang ditujukan untuk membantu pengungsi dari daerah konflik tertentu . UNWRA dibentuk oleh Majelis umum PBB pada tanggal 8 Desember 1949 pasca terjadinya Perang Arab-Israel 1948. UNRWA, Badan Penolong Jutaan Pengungsi Palestina. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180902102646-120-326888/unrwa-badan-penolong-jutaan-pengungsi-palestina>. Diakses pada 20 Agustus 2018.

pengambilan keputusan tersebut, karena akan mengancam stabilitas di kawasan Timur Tengah (Independent, 2018).

Keputusan Donald Trump tersebut merupakan perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dimana Presiden sebelumnya masih mempertimbangkan stabilitas kawasan di Timur Tengah dalam mengambil keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel, yang tertera dalam Konstitusi *Jerusalem Embassy Act* 1995 tersebut. Donald Trump berpendapat, bahwa sebagai broker perdamaian antara Palestina dengan Israel, Amerika Serikat telah mengejar kesepakatan akhir dari berbagai perundingan yang sebelumnya telah dilakukan. Namun demikian, keputusan Trump tersebut telah mengubah arah politik luar negeri Amerika Serikat dalam menyikapi konflik Palestina-Israel dan juga bertentangan dengan sebuah Konsensus Internasional bahwa nasib kota suci harus di putuskan dalam perundingan damai. Keputusan Donald Trump tentang Yerusalem sebagai Ibukota Isarel merupakan keputusan yang bersifat sepihak yang ditentukan oleh pihak “ketiga” yakni Amerika Serikat sebagai mediator konflik, tanpa melibatkan kesepakatan kedua negara yang berkonflik yakni Palestina dengan Israel.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dimana keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Isarel telah menimbulkan kontroversi dan permasalahan baru khususnya di wilayah Timur Tengah. Output dari keputusan tersebut juga menyalahi perjanjian damai yang telah dilakukan selama ini antara kedua belak pihak yang berkonflik yakni Palestina dengan Israel dan melanggar sebuah Konsensus Internasional. Seperti yang telah dipaparkan diatas, hal ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah terkait hal yang melatar belakang keputusan Donald Trump tersebut dan mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul:

**“Keputusan Donald Trump tentang Pengakuan Yerusalem sebagai
Ibukota Israel”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan ruang lingkup pembahasan guna membatasi permasalahan yang dibahas. Hal ini sangat penting karena pembatasan permasalahan membuat karya ilmiah lebih terfokus pada suatu masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, ruang lingkup pembahasan menjaga agar masalah yang diteliti terhindar dari pembahasan yang lebih luas sehingga keluar dari konteks permasalahan. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan dua batasan masalah, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini pada kebijakan terhadap pengambilan keputusan yang telah di deklarasikan secara internasional terhadap pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan tujuan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat melakukan kebijakan tersebut. Penulis juga memfokuskan pada proses perdamaian yang telah dilakukan Amerika Serikat sebagai mediator hingga keputusan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel dikeluarkan.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini dimulai pada saat Presiden Donald Trump memaparkan pandangannya terkait konflik Palestina dengan Israel pada saat kampanye tahun 2016 . Kemudian batas waktu akhir yang diambil yaitu pada tahun 2018, dimana keputusan terhadap pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel mulai terbuka dan secara terang-terangan dilakukan oleh pihak Amerika Serikat.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang paling penting dari sebuah penelitian, bagian ini merupakan kunci sebuah penelitian. Rumusan masalah menjadi acuan bagaimana menyajikan data dan analisis penelitian. Maka berdasarkan latar

belakang diatas yang telah dipaparkan penulis, Oleh karena itu penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

“ Mengapa Presiden Donald Trump mengambil keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel ? ”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam karya ilmiah harus sejalan dengan rumusan masalah yang telah diambil. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis dan memahami keputusan yang diambil Presiden Donald Trump terkait sengketa wilayah Yerusalem oleh pihak Palestina dengan Israel.

1.5 Kerangka Dasar Konseptual

Untuk memahami suatu fenomena, sesuai dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional para ilmuan hubungan internasional telah memberikan langkah-langkah untuk memahami suatu fenomena, para *scholar* hubungan internasional dalam hal ini berteori untuk menjadi dasar memprediksi suatu fenomena, dan menggunakan suatu konsep-konsep yang membentuk seperangkat pemahaman yang dapat dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membuat sebuah silogistik yang bisa disebut dengan teori. Dalam konsep tersebut bertujuan untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik yang diteliti oleh seorang peneliti. Teori dan konsep menjadi pedoman dan sudut pandang bagi peneliti dalam melihat dan menganalisa permasalahan utama (Mas'ood, 1990: 107).

Dalam memahami suatu fenomena, penulis menggunakan konsep-konsep dan teori, dengan mengikuti pengacu-pengacu sebelumnya. Adapaun teori yang digunakan dan sesuai dengan fenomena yang ada adalah decision making theory. Hal ini berdasarkan penelitian yang membahas tentang suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terkait keputusan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Decision Making Theory

Politik luar negeri merupakan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dalam negeri maupun luar negeri dan juga menentukan keterlibatan suatu negara pada isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. Setiap negara memiliki politik luar negeri yang tentunya berbeda-beda tergantung dari tujuan negara tersebut. Politik luar negeri sendiri erat kaitannya terhadap suatu pembuatan keputusan yang dipengaruhi oleh aktor pembuat keputusan untuk menentukan arah tindakan negara.

Teori politik luar negeri yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder dalam model pembuatan keputusannya (*the decision-making model*) berusaha menjelaskan politik luar negeri suatu negara dengan mencari alasan atau penyebab apa yang telah melatarbelakangi dari pembuatan keputusan tersebut oleh para pembuat keputusan. Richard Snyder adalah seorang teoritis yang telah memelopori pendekatan pembuatan keputusan dalam analisis politik luar negeri (Mas'ood, 1989 : 116).

Dalam fenomena pengambilan keputusan yang dilakukan Presiden Donald Trump, maka Presiden Donald Trump dapat menjadi kajian dalam analisis pengambilan keputusan. Dimana analisis pengambilan keputusan atau *decision making theory* merujuk kepada asumsi dasar dari perspektif Richard Snyder yakni bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang mana para pemimpin negara baik individu maupun kelompok bertindak sebagai aktor – aktor utama dalam proses pengambilan keputusan (Hara, 2011: 86). Pada asumsi dasar Snyder tersebut menjelaskan bahwa siapapun bukan merupakan unit analisis *decision* kecuali para pemimpin negara, dalam hal ini Donald Trump pada saat mengambil keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, memegang jabatan sebagai Presiden. Maka Donald Trump termasuk dalam unit analisis seperti yang terdapat dalam asumsi dasar Snyder.

Berikutnya di dalam proses pengambilan suatu keputusan tersebut, Donald Trump berfikir secara rasional, dan penulis mengasumsikan bahwa Donald Trump berfikir secara rasional. Karena di dalam teori pengambilan keputusan, merujuk kepada aktor pengambil keputusan secara rasional dalam mengambil suatu

keputusan. Karena suatu keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan akan berpengaruh terhadap kepentingan negara. Aktor rasional disini seperti yang dijelaskan Stephn M. Walt sebagai aktor individu yang memiliki *power* atau kekuasaan, seperti kepala negara, yang bertindak sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai kepentingan negara. Dalam membuat suatu keputusan, sebagai aktor rasional tentu akan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut, dan meminimalisir adanya “*cost*” yang dikorbankan negara untuk mencapai suatu kepentingan (Walt, 1999: 21).

Analisis terkait alasan Donald Trump membuat keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, penulis menggunakan analisis rasional, yakni karena Donald Trump sejak awal telah mengambil posisi untuk mendekati Lobi Yahudi di Amerika Serikat, yang menjadi perhitungan Donald Trump, yaitu terkait dengan apa yang akan didapatkan dari kelompok kepentingan Lobi Yahudi. Hal ini berkaitan dengan Lobi Yahudi yang merupakan kelompok kepentingan ekonomi terkuat di Amerika Serikat. Namun disisi lain, jika Donald Trump ingin meraup suara mayoritas masyarakat maka kelompok lobi yahudi ini merupakan kelompok yang sedikit memiliki peran suara langsung dalam *electoral threshold*. Namun para pemilih dalam *electoral threshold* tersebut dapat dipengaruhi dengan program-program kampanye yang dilakukan oleh Donald Trump dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi pelobi Yahudi dan tentu saja dengan biaya yang cukup. Dalam hal ini menentukan pilihan *cost and benefit* Donald Trump ketika menggunakan isu pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Selanjutnya, *cost and benefit* yang dipertimbangkan Donald Trump dengan menggunakan isu pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel tersebut juga berdasarkan perhitungan bahwa di dalam masyarakat pemilih Amerika Serikat pada konteks pemilihan umum di Amerika Serikat, faktor politik luar negeri juga menjadi suatu pertimbangan, seperti pertimbangan apakah konstelasi politik di Timur Tengah memungkinkan Amerika Serikat untuk begitu terbuka mendukung sekutunya yaitu Israel. Karena Negara Israel di kepung oleh negara-negara Arab yang mayoritas merupakan negara-negara Islam dan memiliki jaringan dengan

negara-negara Islam di dunia internasional. Hal ini juga mempengaruhi pandangan negara-negara Islam di dunia internasional, dimana Israel seringkali dipandang secara stereotype melakukan tindakan-tindakan yang cenderung negatif terhadap Palestina seperti pendudukan, perebutan wilayah, pengusiran paksa, pelanggaran hak asasi manusia dalam peperangan sipil. Berbagai pandangan terhadap Israel tersebut juga menjadi isu di dunia internasional. Maka hal ini mempengaruhi bagaimana Donald Trump memilih tindakan untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem terhadap isu internasional terkait hubungan dekat antara Amerika Serikat dengan Israel. Selain itu juga mempertimbangkan situasi politik negara-negara di Timur Tengah, yang dapat mempengaruhi proses berjalannya keputusan tersebut. Kemudian juga menjelaskan bagaimana hubungan Donald Trump dengan sekutunya di negara-negara Timur Tengah, apakah dalam hal ini Donald Trump memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara di Timur Tengah, sehingga dapat mengatur dan memainkan konstelasi politik Amerika Serikat di Timur Tengah untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini menjadikan faktor Arab Saudi menjadi penting.

Seperti yang dijelaskan bahwa pilihan rasional dirasa tepat oleh pembuat kebijakan, dimana dalam pembuatan keputusan menekankan terhadap asumsi-asumsi *cost and benefit* yang dipertimbangkan dalam membuat suatu keputusan. Benefit yang diterima oleh Presiden Donald Trump adalah dengan adanya dukungan kelompok kepentingan yang kuat di Amerika Serikat yakni lobi Yahudi dan juga dukungan Negara Israel. Sedangkan *cost* yang ditanggung oleh Donald Trump yakni dengan tidak mendapat dukungan dari warga negara Amerika Serikat, manakala kepentingan Amerika Serikat di luar negeri, terutama di wilayah Timur Tengah tersebut terabaikan. Hal tersebut merupakan *cost and benefit* yang dipertimbangkan oleh Donald Trump. Namun langkah yang ditempuh oleh Donald Trump yakni dengan berkampanye dan memberikan statement bahwa ia akan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan menjadikan rencana tersebut sebagai agenda politiknya. Lalu pada saat Donald Trump terpilih menjadi Presiden

Amerika Serikat, Donald Trump mengambil langkah mengambil keputusan Politik Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama bertujuan untuk memaparkan jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah. Sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis tersebut, maka dalam karya ilmiah ini penulis berargumentasi bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh Presiden Amerika Serikat tentang pengakuan Yerusalem sebagai wilayah Israel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dimana menurut Donald Trump keputusan tersebut lebih menguntungkan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan negara.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara peneliti untuk memperoleh dan membuktikan kebenaran serta pengetahuan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Metode yang dilakukan dimulai dengan proses pengumpulan data, analisa mengenai data tersebut, dan menyimpulkannya sehingga didapatkan kebenaran dan pembuktian tentang pengetahuan. Dengan menggunakan metode penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis variabel yang ada terkait isu yang sedang dibahas. Metode penelitian dibagi menjadi dua bagian, yakni metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik teknik studi literatur atau *secondary* data dalam mengumpulkan data-data penelitian. Dalam metode studi literatur peneliti tidak diharuskan untuk melakukan observasi langsung dari lapangan mengenai permasalahan yang sedang diangkat, melainkan melalui buku-buku dan penelitian terdahulu yang dianggap masih relevan baik

dalam hal lingkup pembahasan maupun lingkup batasan waktu dalam penelitian. Studi literatur dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional
2. Media internet
3. Publikasi dari peneliti yang relevan
4. Situs resmi pemerintahan

1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan karya ilmiah ini dimulai dengan pengumpulan berbagai materi yang dibahas, kemudian disajikan dan diverifikasi. Analisis yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dimana teknik tersebut berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena disertai dengan argumen penulis mengenai permasalahan yang dibahas dan mengkualifikasikan data-data ilmiah yang saling berkaitan sehingga bisa menemukan kesimpulan yang ilmiah dan objektif. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis sehingga penulis bisa mengetahui jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah yang merupakan tujuan awal dari penelitian yakni untuk mengetahui alasan dari keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi menjadi 5 bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan penulis menyajikan latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Kemudian dalam bab ini penulis juga akan memaparkan rincian terkait penelitian yang dilakukan dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, yang meliputi ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Pandangan Amerika Serikat tentang Konflik Palestina dengan Israel

Dalam Bab II penulis menjelaskan sudut pandang Amerika Serikat dalam melihat konflik Palestina dengan Israel. Hal ini menyangkut sikap Amerika Serikat dalam yang seringkali bias dan mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan konflik Palestina dengan Israel.

Bab 3. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel

Dalam Bab III ini penulis membahas mengenai beberapa kebijakan yang telah dilakukan Presiden sebelum Donald Trump dalam merespon konflik Palestina dengan Israel hingga keputusan yang dikeluarkan Donald Trump untuk mengakui wilayah Yerusalem sebagai bagian dari Israel.

Bab 4. Pertimbangan Keputusan Presiden Donald Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel

Dalam bab IV penulis menganalisa dan memaparkan rasionalitas yang mendorong adanya keputusan untuk mengakui wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel, dalam hal ini penulis menyajikan analisisnya terkait alasan Presiden Donald Trump mengambil tindakan tersebut, analisis tersebut berupaya menjawab inti dari persoalan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah dari karya ilmiah ini.

Bab 5. Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang akan disajikan dalam karya tulis ini, yakni dengan memberikan pemaparan dari jawaban yang singkat dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penutup dalam karya tulis ilmiah ini akan berisi tentang jawaban permasalahan yang tertera pada bab-bab sebelumnya dalam bentuk yang lebih sederhana.

BAB 2. PANDANGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG KONFLIK PALESTINA DENGAN ISRAEL

Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel merupakan permasalahan yang pelik, dan menyita perhatian masyarakat internasional. Hal ini karena melibatkan perebutan wilayah, terutama wilayah penting seperti Yerusalem yang merupakan kota peradaban bagi berkembangnya agama samawi yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Selain itu konflik yang telah berlangsung lama tersebut juga melibatkan beberapa pihak baik pada masa konflik terjadi sampai pada upaya perundingan penyelesaian konflik. Terutama Amerika Serikat menjadi negara utama yang masuk dalam konflik tersebut, hal ini dikarenakan saat ini Amerika Serikat mempunyai pengaruh besar secara politik di dunia Internasional khususnya untuk menjalankan kepentingannya di Timur Tengah. Amerika Serikat sendiri juga berperan sebagai broker perdamaian dalam konflik kedua negara tersebut. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana konflik Yerusalem menurut pandangan Amerika Serikat dengan ditinjau dari sejarah konflik Palestina dengan Israel, dan konflik perebutan wilayah Yerusalem. Selain itu menjelaskan tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik wilayah antara Palestina-Israel.

2.1 Sejarah Konflik Palestina dengan Israel

Permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara yakni Palestina dengan Isarel merupakan konflik terpanjang dalam sejarah. Menurut sejarah Islam tanah Palestina merupakan daerah kekuasaan Dinasti Utsmaniyah (Ottoman), Turki. Dinasti tersebut telah menguasai seluruh wilayah Asia Barat sejak tahun 1516. Penduduk disana pada masa lampau menyebut daerahnya dengan Filastin atau Al-Ard al Muqaddasa yang artinya tanah yang suci. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersbut merupakan wilayah yang diagungkan oleh penganut tiga keyakinan yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada masa pemerintahan Utsmaniyah, Palestina dibagi menjadi tiga provinsi yakni Yerusalem, Nablus dan Acre. Penguasa

Utsmaniyah pada masa pemerintahannya menggunakan *sistem millet*³ yang memberikan otonomi luas terhadap penduduk penganut Kristen dan Yahudi. Seluruh penduduk disana dijamin kehidupan sosial, keagamaan, budaya, dan faktor lainnya. Maka pada masa itu keadaan masyarakat di wilayah tersebut berjalan damai, toleransi beragama yang tinggi (Lenczowski, 1993: 67).

Namun demikian, keadaan seakan berbalik pada saat kekuasaan Turki di Palestina berakhir pada masa menjelang berakhirnya Perang Dunia I, dimana Turki menerima kekalahan atas perang. Hal ini berujung pada tahun 1918, dimana Palestina dikuasai Inggris, dan juga pada tahun 1923 Liga Bangsa-Bangsa (LBB) secara resmi menyerahkan mandat kepada pihak Inggris untuk mengurus wilayah Palestina. Konflik antara dua bangsa tersebut bermula pada saat Inggris merangkul bangsa Arab dalam mengalahkan Imperium Utsmaniyah. Hal ini berujung pada perjanjian yang disepakati pihak bangsa Arab yang diwakilkan oleh Sharif Husein, yang mana Hussein berjanji untuk membantu operasi militer yang dilakukan pihak Inggris untuk melawan Turki. Sebaliknya, pihak Inggris menjanjikan memberikan dukungan atas “kemerdekaan Arab” atas intruksi pemerintah Inggris dengan wilayah yang luas, dan juga pihak Inggris menjamin perlindungan tempat ibadah dan berjanji membantu pembentukan pemerintahan Arab yang baru. Namun demikian, perjanjian tersebut mendapat hambatan dengan adanya perjanjian Sykes-Picot⁴ yang lebih dulu dilakukan pihak Inggris dengan Perancis (M. Riza Sihbudi, 1993: 56). Perjanjian Sykes-Picot sendiri merupakan perjanjian rahasia yang melibatkan tiga pihak yakni Inggris, Perancis, dan Rusia yakni dengan pembagian wilayah bekas kekuasaan Ottoman oleh masing-masing negara, dan perjanjian

³ Sistem *millet* merupakan sebuah sistem yang mengatur hak-hak non-muslim. Sistem tersebut dikenal dengan nama *millet*. Jika dilihat dari penjelasan mengenai pembagian kelompok *re'aya* bagi non-muslim, boleh jadi sistem *millet* ini merupakan perwujudan dari kebijakan awal mengenai non-muslim. Hal ini ditarik dari fakta bahwa sebelum adanya sistem *millet*, kelompok-kelompok non-muslim diberikan sebuah wilayah tersendiri dan pemimpinnya memiliki otoritas untuk mengatur dengan leluasa anggota kelompoknya. Rifai Shodiq. 2016. Kebijakan Sistem Millet. <http://wawasansejarah.com/kebijakan-sistem-millet/>. Diakses pada 5 Agustus 2018

⁴ Perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani pada tahun 1916 adalah perjanjian rahasia antar pemerintah Inggris dengan Perancis yang juga disetujui oleh Kerajaan Rusia, dimana ketiga negara tersebut mendiskusikan pengaruh dan kendali di Asia Barat pasca jatuhnya kerajaan Usmaniyah pada PD I. Perjanjian ini membelah kawasan Arab di bawah Kerajaan Ottoman, sehingga mempermudah Inggris dan Perancis untuk membagi pengaruhnya di wilayah-wilayah Arab tersebut. Rifai Shodiq. 2017. Perjanjian Sykes-Picot (1916). 2017. <http://wawasansejarah.com/perjanjian-sykes-picot/>. Diakses pada 5 Agustus 2018.

rahasia tersebut dilaksanakan atas dasar kepentingan sekutu dalam memenangkan peperangan.

Situasi lain yang membuat pembagian wilayah tersebut semakin rumit yakni dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak Inggris dengan Bangsa Yahudi. Hal ini bermula dari bantuan kelompok Zionis Yahudi dengan menyumbangkan usaha-usaha perang bagi kepentingan Inggris dan berusaha menarik perhatian pejabat Inggris untuk melancarkan kepentingan dan aspirasi pihak Zionis.

Jika dipandang dari perspektif keagamaan, makna Zionisme sendiri berasal dari bukit Zion yang merupakan kedudukan penting dalam agama Yahudi, hal ini berkaitan dengan ajaran Taurat bahwa Al-Masih akan menuntun mereka pada tanah yang dijanjikan, dan tanah yang dijanjikan tersebut merujuk pada bukit Zion yang diidentikkan dengan kota suci Yerusalem. Namun demikian, jika dipandang dari perspektif politik makna Zionisme lebih kepada gerakan diaspora Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, untuk kembali membentuk sebuah bangsa Yahudi di tanah Palestina. Makna politik tersebut di cetuskan oleh Nathan Bernbaum dan Zionisme Internasional pertama dibentuk di New York pada tanggal 1 Mei 1776, dua bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat di deklarasikan di Philadelphia (Maulani, 2003: 48).

Kepentingan Zionis sendiri didasari adanya tindakan anti Zionis Yahudi di Rusia, sehingga membuat kelompok Yahudi Zionis tersebut berpindah haluan dan mencari perlindungan kepada pihak sekutu lain. Tujuan Zionis tidak lagi untuk menyingkirkan Imperium Utsmaniyah dari tanah Palestina, namun juga ingin menjatuhkan Rusia agar menerima kekalahan perang. Kelompok Zionis sendiri tumbuh subur dan berkembang dengan baik di Amerika Serikat. Tujuan Zionis di Inggris dan Amerika sendiri adalah memperoleh jaminan Sekutu agar jika pihak Turki Utsmani kalah, Palestina dapat dikuasai menjadi bagian dari persemakmuran Yahudi.

Pada tahun 1917 merupakan awal keberhasilan Zionis, dimana salah satu tujuan Zionis telah terwujud dengan terjadinya Revolusi di Rusia, dan juga masuknya Amerika Serikat ke dalam peperangan Sekutu dan terus mengawasi Rusia agar tidak melaksanakan perjanjian terpisah dengan Jerman. Hal ini didukung dengan Perdana Menteri Inggris Lloyd George dan juga Lord Balfour yang

memiliki keyakinan bahwa aspirasi Zionis harus diwujudkan, dan pentingnya memperoleh dukungan dari sahabat baru Inggris yakni Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat terdapat banyak sekali penduduk Yahudi yang mendukung kelompok Zionis tersebut. Dalam perundingannya dengan Inggris, pihak Zionis mengharapkan protektorat Inggris atas Palestina agar wilayah tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari persemakmuran Yahudi. Hal ini dikuatkan dengan adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Inggris saat itu yakni Lord Balfour dengan Presiden Amerika Serikat Wilson, yang bertujuan agar Zionis memperoleh pernyataan umum bahwa Presiden Wilson mendukung langkah Zionis. Hal tersebut sempat mendapat penolakan dari Presiden Wilson karena Amerika Serikat pada saat itu tidak berperang dengan Turki, Namun demikian, setelah Inggris mengeluarkan pernyataan untuk mendukung Zionis yang dibacakan Kolonel House, Presiden Wilson memerintahkan menyusun deklarasi Zionis yang diusulkan oleh kabinet Inggris. Hal ini berujung pada Deklarasi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour sebagai penerimaan atas rancangan Zionis yang juga disebut Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 (CNN Indonesia, 2017). Adanya deklarasi tersebut tentu telah menciderai perjanjian Skyes-Picot yang telah disepakati Inggris kepada Perancis dan Rusia, dimana seharusnya wilayah Palestina tersebut seharusnya di internasionalisasikan. Keadaan tersebut diperburuk pada akhir Perang Dunia I dimana Turki kalah Perang, dan pada tahun 1923 Liga Bangsa-Bangsa secara resmi menyerahkan mandat kepada Inggris untuk mengurus wilayah Palestina.

Tuntutan yang diberikan kelompok Zionis Yahudi terhadap pemerintahan Inggris menjadi beban tersendiri bagi pihak Inggris. Hal ini diperparah dengan keadaan bangsa Yahudi pada saat pecahnya Perang Dunia II, karena terjadi anti semitisme di berbagai negara khususnya di wilayah Eropa Timur. Bangsa Yahudi mengalami penyiksaan yang dilakukan Nazi dan membuat bangsa Yahudi bermigrasi secara besar-besaran. Bangsa Yahudi menjadi kelompok besar dari kalangan orang-orang terlantar yang di tampung di Jerman Barat. Mereka terbagi dalam tiga kelompok besar, yang pertama merupakan para korban kekejaman Nazi yang bertahan hidup dan dibebaskan dari kamp-kamp konsentrasi Jerman oleh bantuan Sekutu, kedua merupakan kelompok Yahudi Polandia yang telah di buang

ke Uni Soviet pada tahun 1939 hingga tahun 1940 dan setelah perang diperbolehkan meninggalkan Uni Soviet, dimana mereka juga tidak mau tinggal di Polandia yang menjadi negara dominasi Uni Soviet meskipun pihak Uni Soviet menjanjikan adanya politik non-diskriminasi, ketiga merupakan kelompok Yahudi yang berasal dari Eropa Timur yang menyadari bahwa pola politik dan ekonomi komunis di negara-negara satelit Uni Soviet tidak memberi harapan bagi pedagang, makelar dan bisnis yang bebas. Anti semitisme yang terjadi pada bangsa Yahudi yang diperparah dengan adanya pengaruh Uni Soviet di daerah Eropa Timur, mendukung organisasi Zionis untuk segera mendapat kepastian mengenai tanah Palestina. Namun demikian, yang terjadi Inggris yang kebingungan atas keberpihakannya dengan kedua bangsa tersebut menghambat bangsa Yahudi untuk melancarkan imigrasi nya di tanah Palestina. Hal ini berimbas pada perpecahan sikap pro-Zionis yang dilakukan oleh Zionis Amerika. Pihak pro-Zionis tersebut mendukung Yahudi sepenuhnya atas kepemilikan tanah Palestina secara luas yang dituangkan dalam Program Biltmore⁵ yang dibuat pada tanggal 11 Mei 1942. Program tersebut dinilai pihak Yahudi melangkah lebih jauh dibandingkan dengan Deklarasi Balfour⁶, namun hal ini mendapatkan protes dari pihak Yahudi moderat. Meskipun mendapatkan protes dari pihak Yahudi moderat, namun program tersebut tetap disahkan oleh pihak Organisasi Zionis dan menjadi kebijakan resmi Zionisme pada tanggal 10 November 1942 di Yerusalem (Sihbudi, 2007: 54). Pihak Zionis

⁵ Pada tanggal 11 Mei 1942 Perkumpulan Zionis Amerika Serikat mengadakan pertemuan di New York yang menghasilkan suatu program yakni “Biltmore Programe” yang tujuannya lebih bersifat jangka panjang dibandingkan dengan Deklarasi Balfour, sehingga mendapat kritikan dari kalangan Yahudi Moderat di Eropa dan Amerika Serikat. Isi dari Prgram Biltmore sendiri terdiri dari tiga poin yang diusulkan oleh Ben Gurion selaku Ketua Komite Eksekutif Yahudi, yaitu: (1). Pembentukan negara Yahudi di seluruh wilayah Palestina, (2). Pembentukan Angkatan Darat Yahudi, (3). Pembentukan lembar putih pada tahun 1939 dan pelaksanaan imigrasi tanpa batas yang diawasi oleh Komite Yahudi, bukan pemerintahan Inggris. Jewish library. 2016. Zionis Congresses : The Biltmore Conference. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-biltmore-conference-1942>. Diakses pada 26 September 2018

⁶ Deklarasi Balfour terjadi pada masa PD I tahun 1914-1918. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari mandta Inggris untuk pembagian wilayah Palestina yang baru direbut dari Kekaisaran Ottoman. Mandat tersebut mewajibkan negara yang kalah dalam perang yakni Jerman, Austri-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman untuk memberikan seluruh wilayah kekuasaannya kepada pemenang , yakni Inggris, Prancis dan Italia. Mandat tersebut menjadi permulaan bagi Inggris untuk memfasilitasi perpindahan Yahudi Eropa ke Palestina. Suastha. 2017.Seabad Deklarasi Balfour, Awal Pendudukan Yahudi di Palestina.<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102121910-134-252967/seabad-deklarasi-balfour-awal-pendudukan-yahudi-di-palestina> . Diakses pada 26 September 2018.

beranggapan bahwa politik moderat tidak dapat menghasilkan apapun dan terlebih lagi Inggris tidak dapat diharapkan lagi, sehingga keputusan baru Zionis adalah mencari bantuan Amerika Serikat.

Sejak saat itu imigran Bangsa Yahudi memulai gelombang perpindahan dengan skala besar. Hal tersebut berdampak terhadap keseimbangan jumlah penduduk Arab dan Yahudi di Palestina. Banyaknya imigran Yahudi yang bermigrasi ke Palestina membuat Bangsa Arab Palestina terdesak, dan hal itu menimbulkan konflik yang terjadi antara kedua bangsa tersebut. Konflik tersebut terjadi berlarut-larut dan Inggris sebagai mandat pemegang wilayah Palestina tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut, sehingga masalah tersebut ditangani oleh PBB. Selanjutnya dengan adanya proses yang panjang, akhirnya Majelis Umum PBB menyetujui rencana pembagian Palestina menjadi tiga bagian. Dalam Resolusi No. 181 (II), 29 November 1947, yang disetujui oleh 33 Negara, ditentang 13 Negara, dan abstain 10 Negara, dalam hal itu disebutkan :

1. Negara Arab, dengan wilayah yang terbagi dalam Acre, Nazareth, Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jalur Gaza, dan kota pelabuhan Jaffa.
2. Negara Yahudi, dengan wilayah yang terbagi dalam Safad, Tiberias, Beisan, Haifa, Tulkarm, Ramleh, Sahara Negeb, dan Jaffa
3. Yerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional.

Keputusan tersebut diterima pihak Yahudi, namun mendapat penolakan dari pihak Arab Palestina. Hal itu karena pihak Arab Palestina menganggap pembagian ini tidak adil dan melawan kehendak mayoritas penduduk asli Palestina. Selanjutnya Israel memproklamkan kemerdekaannya sehari setelah mandat Inggris di Palestina berakhir pada 14 Mei 1948. Kemerdekaan itu sebagai pertanda cita-cita orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia tersebut untuk mendirikan negara sendiri terwujud. Setelah Israel berdiri sebagai negara, orang Palestina banyak terusir. Mereka mengungsi ke berbagai negara, bahkan diluar kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan pembangunan pemukiman oleh pihak Israel yang semakin tahun semakin meluas dan semena-mena.

2.2 Yerusalem Sebagai Titik Konflik Palestina dengan Israel

Aneksasi wilayah Yerusalem Timur pada tahun 1967 oleh Israel pada Perang Enam Hari sering dianggap sebagai pemicu konflik yang lebih meluas. Hal ini didasari dengan sejarah yang terdapat pada kota Yerusalem, dimana kota suci yang penting bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi, selama rentang 500 tahun. Kota ini telah mengalami lebih dari sekadar pengepungan, serangan, penaklukan dan bencana, dengan 50 tahun terakhir telah mencapai titik permasalahan yang belum terselesaikan.

Antara 1948 dan 1967, Yerusalem adalah kota terbagi di bawah dua negara: Israel menguasai bagian barat, sedangkan bagian timur, yang termasuk Kota Suci, tunduk pada kekuasaan Yordania. Perang Enam Hari 1967 secara dramatis mengubah situasi: Israel menduduki bagian timur kota dan juga sebagian besar daerah pinggirannya. Pendudukan ini bertentangan dengan hukum internasional, yang dikonfirmasi oleh serangkaian resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan, yang mendefinisikan bagian timur kota sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari Wilayah Pendudukan Palestina. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa Keempat 1949 tentang perlindungan warga sipil di wilayah pendudukan sepenuhnya berlaku untuk penduduk Yerusalem Timur. Israel mengklaim telah menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967 sebagai tanggapan atas perang yang dilakukan Yordania yang melanggar Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1947. Sebagian besar pakar hukum internasional menentang posisi ini dan berpendapat bahwa hak untuk membela diri tidak berarti hak untuk memperluas kedaulatan ke wilayah geografis baru. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap aneksasi Israel Yerusalem Timur modifikasi dari status kota menjadi ilegal.

Israel menganggap orang Arab yang tinggal di Yerusalem Timur 'penduduk permanen' yaitu status yang sama diberikan kepada warga negara asing yang memilih untuk tinggal di negara itu. Status ini memberi penduduk hak untuk memilih dalam pemilihan lokal, tetapi tidak dalam pemilihan untuk legislatif Israel, Knesset. Jika penduduk memenuhi persyaratan tertentu - seperti bersumpah setia kepada Negara Israel, menunjukkan pengetahuan bahasa Ibrani, dan membuktikan bahwa mereka bukan warga negara lain, dan mereka dapat mengajukan

permohonan kewarganegaraan penuh Israel. Sebagian besar warga Palestina tidak berpartisipasi dalam pemilihan kota dan belum meminta kewarganegaraan Israel. Alasan politik yang jelas untuk ini adalah fakta bahwa kewarganegaraan baru mereka akan berarti mereka mengakui Yerusalem sebagai Israel. Mengingat aktivitas permukiman Israel di Yerusalem, keseimbangan demografi 'penduduk permanen' kota dan Israel telah banyak berubah selama beberapa tahun terakhir (Napolitano, 2012).

Jika dilihat dari persepsi kedua negara tentang wilayah Yerusalem, keduanya beranggapan bahwa masing-masing mempunyai hak untuk menguasai wilayah tersebut. Misalnya dari pihak Israel, hasrat untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibukota sudah muncul ketika negara Yahudi ini berdiri. Hal ini dapat ditinjau dari pergerakan Zionisme yang menginginkan agar kaum Yahudi kembali ke tanah nenek moyangnya. Selain itu penguasaan wilayah Yerusalem semakin menguat semenjak tahun 1967, dimana Israel berhasil merebut bagian Timur Yerusalem, dan statusnya sebagai ibu kota negara dikukuhkan dalam undang-undang Israel 1980. Sementara pihak Palestina menganggap bahwa bagian timur kota itu adalah ibu kota negara Palestina di masa depan bila suatu hari hal itu dapat diwujudkan. Hal ini berdasarkan historis dimana penduduk Filistin telah lama menduduki wilayah Yerusalem. Jadi secara jelas bahwa samapi kapanpun Palestina tidak akan menerima jika wilayah Yerusalem dijadikan sebagai ibu kota Israel, dan juga tak pernah diakui secara resmi oleh masyarakat internasional.

2.3 Sudut Pandang Amerika Serikat terhadap Konflik Palestina dengan Isarel

Amerika Serikat sebelumnya merupakan negara yang pasif dalam kancah politik internasional. Namun demikian, hal tersebut berubah sejak terjadinya Perang Dunia II, salah satunya dengan keterlibatan Amerika Serikat pada konflik Palestina-Israel yang terjadi di Timur Tengah. Amerika Serikat mulai memfokuskan kepentingannya di wilayah Timur Tengah, sejak melihat potensi kekayaan alam yang melimpah di Timur Tengah. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan adanya saingan yakni Uni Soviet yang juga ingin menggunakan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.

Jika dilihat secara historis, Amerika Serikat telah sejak lama berada di pihak Israel. Hal ini terhitung sejak pihak Amerika Serikat terlibat dalam persoalan perebutan wilayah oleh bangsa Yahudi dan bangsa Arab di tanah Palestina, yang berujung pada kekecewaan bangsa Yahudi, khususnya yang terorganisir sebagai Zionis terhadap keputusan yang dibuat Inggris tentang pembagian wilayah pada saat itu. Selanjutnya kaum Yahudi berbalik arah dan berusaha mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat untuk mewujudkan impian mereka mendirikan negara Israel.

Pada tahun 1948 dukungan Amerika Serikat tidak memandang negara tersebut sebagai aset strategis, dimana pada saat itu Presiden Truman hanya bersifat simpati terhadap penderitaan bangsa Yahudi. Hubungan Israel dengan Amerika Serikat merupakan gambaran besar untuk mencari dukungan dari negara-negara lain guna melancarkan misi Zionisme. Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali mengakui negara Yahudi tersebut. Amerika Serikat sendiri menyediakan bantuan yang sangat besar pada Israel melalui Bank Ekspor-Import, ditambah lagi pada tahun 1950, pihak Amerika Serikat dan Israel menandatangani perjanjian Point Four guna memperluas bantuan Amerika terhadap Israel. Meskipun sebelumnya keputusan tersebut mendapat pertentangan dari penasehat dan Menteri Luar Negeri George Marshall, yang beranggapan bahwa keputusan mendukung kepentingan ekstrim Zionis tersebut dapat membahayakan hubungan Amerika Serikat dengan dunia Arab dan memudahkan penetrasi Soviet di kawasan tersebut.

Namun demikian, pandangan tersebut berkurang pada awal tahun 1960, dimana pada saat itu Presiden Kennedy beranggapan bahwa Israel berhak memperoleh dukungan yang lebih besar, hal ini disebabkan peningkatan bantuan yang dilakukan Soviet terhadap Mesir, Irak dan Suriah. Meningkatnya bantuan Uni Soviet terhadap negara tersebut menjadi suatu kesempatan bagi para pemimpin Israel untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Israel ada di pihak sekutu, dan hal tersebut diperkuat dengan kemenangan Israel pada Perang Enam Hari tahun 1967, dimana semakin meyakinkan Amerika Serikat bahwa Israel memiliki sumber daya manusia yang unggul, khususnya dalam bidang militer. Dengan adanya kemenangan tersebut, Presiden selanjutnya semakin meyakini bahwa Israel

merupakan aset strategis untuk menumpas pengaruh Soviet di wilayah Timur Tengah. Citra Israel sebagai aset strategis Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah telah menjadi dogma sejak tahun 1967, hal ini diperkuat dengan kemenangan Israel dalam Perang pada bulan Oktober 1973, yang berujung pada keberpihakan Mesir kepada Amerika Serikat, dan berujung terhadap pemutusan hubungan Mesir-Moskow dan juga dengan adanya perjanjian damai antara Mesir dengan Israel. Kemenangan yang berulang kali yang diperoleh Israel membuat Uni Soviet merogoh kocek yang lebih dalam, dan hal ini mempengaruhi perekonomiannya. Selain itu Israel dinilai berjasa bagi Amerika Serikat dalam memudahkan kampanye yang lebih luas dalam persaingannya dengan Uni Soviet khususnya di wilayah Timur Tengah.

Dengan adanya peningkatan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel pasca kemenangan bertubi-tubi yang dipersembahkan Israel, secara otomatis membuat perhatian Amerika Serikat lebih terpusat pada kepentingan Israel. Hal ini di tunjukkan dengan adanya bantuan ekonomi, militer dan perlindungan diplomatik. Seperti yang diketahui pemberian dana bantuan Amerika Serikat pada Israel sangat melimpah. Skala tepatnya tidak diketahui, karena banyak yang disembunyikan dengan berbagai cara. Sebelum 1967, sebelum "hubungan khusus" telah matang, Israel menerima bantuan per kapita tertinggi dari Amerika Serikat dari negara mana pun. Hal ini merupakan bagian substansial dari transfer modal yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel dari luar negeri yang merupakan hampir seluruh investasi Israel, salah satu alasan mengapa kemajuan ekonomi Israel tidak menawarkan model yang berarti bagi negara-negara yang belum berkembang. Ada kemungkinan bahwa jumlah bantuan baru-baru ini untuk sesuatu seperti \$1000 per tahun untuk setiap warga negara Israel ketika semua faktor diperhitungkan (Chomsky, 1983: 32).

Hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Israel juga menggambarkan bagaimana kedua negara tersebut saling bergantung terhadap kepentingannya. Namun demikian, yang perlu ditegaskan, meskipun tingkat dukungan Amerika Serikat yang luar biasa untuk Israel, adalah kesalahan untuk menganggap bahwa Israel mewakili kepentingan utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebaliknya, minat utama terletak pada cadangan energi wilayah tersebut,

terutama di jazirah Arab. Sejak tahun 1945 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggambarkan Arab Saudi sebagai sumber kekuatan strategis yang luar biasa, dan salah satu hadiah material terbesar dalam sejarah dunia. Amerika Serikat berkomitmen untuk memenangkan dan mempertahankan hadiah ini. Sejak Perang Dunia II, hampir merupakan aksioma kebijakan luar negeri Amerika Serikat bahwa cadangan energi ini harus tetap di bawah kendali Amerika Serikat. Variasi yang lebih baru dari tema yang sama adalah bahwa aliran petrodolar harus sebagian besar disalurkan ke Amerika Serikat melalui pembelian militer, proyek konstruksi, deposito bank, investasi dalam sekuritas Treasury, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan kepentingan utama terhadap wilayah tersebut. Maka dalam hal ini pandangan Amerika Serikat dalam konflik tersebut sejatinya tidak terletak pada konflik antara kedua negara, namun lebih pada menggunakan konflik tersebut untuk melestarikan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah.

Namun hal tersebut sebanding dengan beban yang ditanggung Amerika Serikat dengan memenuhi kepentingan Israel. Beban yang ditanggung Amerika Serikat tidak hanya berpengaruh terhadap bantuan ekonomi dan militer, namun juga berimbas pada proses perpolitikan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat merupakan negara demokrasi pluralis dan kebebasan berbicara dilindungi oleh undang-undang, maka menyebabkan kelompok kepentingan cenderung menominasi proses politik. Bagi sebuah bangsa yang sebagian besar datang dari luar Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian kelompok kepentingan ini terbentuk berdasarkan etnik masing-masing, dan juga mereka akan mencoba mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan cara yang berbeda, salah satu yang sering dilakukan adalah dengan proses lobi politik. Namun demikian, kegiatan lobi politik oleh kelompok kepentingan telah menjadi ciri khas negara tersebut, dan hal ini tidak menjadi sesuatu yang kontroversial.

Salah satu yang menonjol diantara lobi kelompok kepentingan adalah kelompok kepentingan Yahudi Israel di Amerika Serikat yang tergabung dalam AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Kelompok lobi terbesar kedua di Amerika Serikat tersebut sukses mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika

Serikat khususnya di wilayah Timur Tengah. Selain itu, kontrol besar kelompok lobi tersebut merambat hingga mempengaruhi proses politik di Amerika Serikat. Salah satu contohnya yakni mempengaruhi pada pencalonan presiden Amerika Serikat, dimana setiap calon presiden Amerika Serikat dalam kampanyenya tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan Israel. Selain hal itu, kelompok lobi AIPAC juga berpengaruh besar terhadap pendanaan bantuan Amerika Serikat ke Isarel. AIPAC, seperti juga badan pelobi Israel lainnya secara umum, terhubung secara longgar dengan *Political Action Committee* (PAC), organisasi yang berisi para kontributor dan pendonor dana untuk menggelar kampanye baik untuk mendukung maupun menentang pencalonan kandidat, inisiatif pemungutan suara dan undang-undang. Kelompok ini memiliki salah satu upaya lobi yang paling canggih dalam perpolitikan Amerika Serikat, dengan pelobi profesional yang mampu melobi para pejabat Kongres Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan Israel. Organisasi ini memiliki perwakilan di seluruh penjuru Amerika Serikat yang dapat melobi anggota Kongres dari distrik asal mereka.

Salah satu keberhasilan lobi yang berdampak terhadap posisi Israel adalah adanya Jerusalem Embassy Act of 1995. Undang-undang tersebut disahkan oleh Amerika Serikat saat berlangsungnya Kongres ke-104 pada tanggal 23 Oktober 1995. Undang-undang tersebut mulai disahkan dan sebagai dasar hukum untuk memproses alokasi dana pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 1999, namun dalam undang-undang tersebut terdapat peraturan untuk menanggulangi undang-undang apabila mengganggu keamanan nasional negara (Foreign Policy, 2018). Undang-undang ini juga mengakui Yerusalem sebagai kota yang tidak terpisahkan dan ibu kota negara Israel. Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, tetapi klaim ini tidak diakui secara internasional karena dialog status akhir konflik Israel dengan Palestina belum usai. Namun demikian, undang-undang tersebut memperoleh penangguhan dengan alasan keamanan Amerika Serikat, sehingga pada masa pemerintahan Bill Clinton hingga Barrack Obama menetapkan ketetapan presiden untuk penundaan realisasi dari undang-undang tersebut.

BAB 3. KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA DENGAN ISRAEL

Proses penyelesaian konflik antara negara Palestina dan Israel merupakan salah satu agenda penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini berkaitan dengan peran Amerika sebagai broker perdamaian antara kedua belah pihak, dimana Amerika Serikat menjadi negara yang mendominasi dalam penggunaan hak veto di Dewan Keamanan terkait resolusi konflik Palestina dengan Israel. Pengaruh Amerika Serikat, khususnya keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis Palestina dengan Israel merupakan akar dari banyak permasalahan yang terjadi di Timur Tengah. Keterlibatan Amerika Serikat secara terus menerus mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait krisis Palestina dengan Israel, dimana Amerika Serikat cenderung bersikap berat sebelah, dan juga mengamankan posisinya di atas konflik kedua negara tersebut. Bab ini menjabarkan keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis Palestina dengan Israel yang telah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat sejak masa pemerintahan Bill Clinton hingga masa pemerintahan Donald Trump.

3.1 Pada Masa Kepemimpinan Presiden Bill Clinton

Pada kepemimpinan Bill Clinton merupakan realisasi awal dari perundingan perjanjian damai antara Palestina dengan Israel, hal ini merupakan bentuk realisasi dari keputusan Presiden sebelumnya George Herbert Walker Bush, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat sangat berkepentingan dalam proses perdamaian Palestina dengan Israel, dan perdamaian tersebut harus ditegakkan sesuai dengan Resolusi DK PBB no 24 dan 338, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kedua negara yaitu pengakuan terhadap kedaulatan Israel dan juga pengakuan hak politik Palestina. Namun demikian, rencana yang dibuat oleh Presiden George Bush Sr tidak dapat terealisasi karena kekalahan yang diterima George Bush Sr yang melawan Bill Clinton dari partai Demokrat pada pemilihan umum tahun 1992. Kekalahan tersebut disebabkan politik George Herbert Walker Bush yang keliru, dimana George Herbert Walker Bush melakukan tekanan

terhadap Israel untuk membuat konsesi sepihak dalam proses perdamaian, dan sikap mendua George Herbert Walker Bush dengan membiarkan keamanan Israel terancam karena menjual senjata canggih ke Arab Saudi. Keputusan tersebut membuat kaum Yahudi Amerika Serikat tidak bersimpati pada pemerintahan George Herbert Walker Bush karena dianggap telah memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Hal ini bertolak belakang dengan lawan politik George Herbert Walker Bush yaitu Bill Clinton yang merupakan seorang yang pro-Israel dan diperkuat dengan partai Demokrat yang juga sangat berpihak terhadap kepentingan Yahudi Amerika Serikat. Setelah resmi menggantikan Presiden George Herbert Walker Bush pada tahun 1992, Presiden Bill Clinton memulai pembicaraan damai secara rahasia yang melibatkan Israel dan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) pada tahun 1993.

Namun setelah dua tahun perjalanan masa pemerintahannya, Bill Clinton dihadapkan dengan "desakan" pihak bipartisan dan Senat untuk memindahkan Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Upaya untuk memindahkan Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem juga mendapat dukungan dari pihak Kongres, dengan mengeluarkan undang-undang tentang *Jerusalem Embassy Act* pada tahun 1995. Undang-undang itu menyatakan bahwa "Yerusalem harus diakui sebagai ibukota Negara Israel" dan bahwa "Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel harus didirikan di Yerusalem selambat-lambatnya 31 Mei 1999." Untuk memastikan hal ini terjadi, ia menjatuhkan sanksi pada cabang eksekutif jika gagal mengambil langkah-langkah seperti itu sepanjang waktu yang disebutkan. Pemerintahan Clinton, bagaimanapun, mengajukan keberatan keras ketika undang-undang ini diperdebatkan. Dari perspektif kebijakan, undang-undang ini terjadi tidak lama setelah Perjanjian Taba yang dirayakan di mana Israel dan Palestina baru saja menyepakati pengaturan pemerintahan sementara untuk Tepi Barat dan Gaza. Harapan tinggi bahwa momentum ini akan mengarah pada perdamaian abadi, dan pemerintahan Clinton berargumen bahwa "fokus prematur pada Yerusalem" dapat "merusak negosiasi dan mempersulit peluang untuk perdamaian. Pemerintahan Clinton juga menyatakan bahwa tindakan untuk merelokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem tersebut adalah inkonstitusional, menyatakan dalam sebuah memorandum oleh Kantor Penasehat Hukum Departemen Kehakiman

bahwa "Konstitusi memberikan wewenang eksklusif kepada Presiden untuk melakukan hubungan diplomatik Bangsa dengan Negara lain, termasuk masalah pengakuan, dan bahwa "Kongres tidak dapat mengganggu otoritas konstitusional Presiden untuk melakukan urusan luar negeri Bangsa dan untuk mengakui pemerintah asing dengan mengarahkan relokasi kedutaan" melalui keterbatasan dana. Dengan kedua alasan itu, pemerintahan Clinton mengancam akan memveto. Demi menghindari adanya veto dari Presiden Bill Clinton, pihak Kongres pada akhirnya memberikan fleksibilitas untuk mengubah tindakan yakni dengan menambahkan ketentuan penangguhan undang-undang (*Waiver Authority*), yaitu Presiden dapat menangguhkan implementasi undang-undang tersebut untuk periode enam bulan tambahan pada akhir periode apa pun selama penangguhan berlaku, jika Presiden menentukan dan melaporkan kepada Kongres sebelum penangguhan tambahan bahwa penangguhan tambahan dilakukan diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.

Selanjutnya, tindakan Presiden Bill Clinton menyetujui undang-undang tersebut, namun hingga pada masa akhir pemerintahannya Bill Clinton memilih upaya untuk mengangguhkan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan *cost* yang lebih besar yang harus dipertaruhkan daripada keuntungan yang terbatas pada pelaksanaan kepentingan konstitusional Amerika Serikat yang akan diperoleh oleh pemerintahan Bill Clinton, apabila pemerintahannya mengimplementasikan undang-undang tersebut, mengingat undang-undang ini terjadi tak lama setelah Perjanjian Taba (Oslo II) yang dirayakan di mana Israel dan Palestina baru saja menyepakati pengaturan pemerintahan sementara untuk Tepi Barat dan Gaza. Presiden Bill Clinton juga mempertimbangkan untuk tidak mengimplementasikan undang-undang karena dapat merusak kesepakatan damai yang telah diupayakan Amerika Serikat terhadap Palestina dengan Israel, dan dapat memicu sentimen negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat. Selain itu menjelang akhir pemerintahannya, perundingan damai antara Palestina dengan Israel menghadapi hambatan dengan adanya serangan intifada kedua akibat dari kegagalan perundingan Camp David tahun 2000 akibat sikap bias Pemerintah Amerika Serikat terhadap Israel. Dalam dua periode pemerintahannya, Presiden Bill Clinton lebih

memilih memfasilitasi beberapa perundingan perdamaian terhadap pihak Palestina dengan Israel.

3.1.1 Perundingan Oslo I

Pemerintahan Clinton awalnya tidak menjadikan perdamaian Israel dengan Palestina sebagai prioritas. Clinton dan para penasihatnya percaya bahwa terobosan diplomatik pada jalur Israel dengan Suriah akan lebih mungkin, dan bahwa para pemimpin Israel akan merasa lebih mudah secara politik untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan daripada mundur dari Tepi Barat. Kesepakatan Israel dengan Suriah, juga akan mengarah pada perjanjian Israel dengan Lebanon, dan membantu mengisolasi Irak dan Iran, lawan utama dari proses perdamaian. Para pejabat Amerika Serikat diberi penjelasan tentang perundingan rahasia bahwa orang Israel dan Palestina mulai di Oslo pada bulan Desember 1992, tetapi tidak berusaha untuk terlibat di dalamnya. Namun demikian, Clinton menyadari bahwa sebagian besar dukungannya dapat meredakan krisis yang terjadi antara Palestina-Israel.

Kesepakatan Oslo merupakan agenda penting dalam tercapainya perdamaian di Timur tengah. Perundingan yang menghasilkan dua perjanjian terpisah tersebut ditandangani oleh pemerintah Israel dan pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang melibatkan Amerika Serikat sebagai pihak yang memoderasi pertemuan yang dimulai pada 20 Januari 1993 di kota Oslo, Norwegia. Selanjutnya, Kesepakatan Oslo tersebut diratifikasi di Washington DC. Perundingan yang awalnya bersifat rahasia tersebut membuat pihak-pihak yang terkait tidak terbuka dengan kehadiran mereka di pembicaraan damai, karena akan menimbulkan kontroversi. Hal ini karena persepsi pihak-pihak yang berkonflik yang tidak pernah sepemahaman, dimana pihak Israel menganggap PLO sebagai organisasi teroris, dan dengan demikian dapat melanggar larangan negara tersebut dengan bernegosiasi dengan teroris. Sementara dari pihak PLO sejak awal tidak pernah mengakui legitimasi Israel.

Tujuan dari terjadinya Perundingan Oslo sendiri merupakan bentuk dari langkah awal yang dilakukan oleh Presiden Bill Clinton untuk memperlihatkan komitmennya bahwa Amerika Serikat tetap akan melanjutkan proses perdamaian antara Palestina dengan Israel pasca perjanjian Camp David. Perundingan tersebut

akhirnya mempertemukan kedua belak pihak yang berkonflik dalam pembicaraan perdamaian untuk pertama kalinya. Kedua belak pihak baik Palestina maupun Israel memiliki alasan dari keputusannya berpartisipasi dalam perundingan tersebut, bagi pihak Palestina alasan utama mereka adalah kekalahan yang bertubi-tubi yang dirasakan Palestina sejak perang yang dilakukan tahun 1960-an, dan juga hilangnya sekutu terkuat mereka pasca runtuhnya Uni Soviet. Sedangkan dari pihak Israel perundingan tersebut dilakukan atas dasar keamanan negaranya pasca terjadinya Invasi Irak ke Kuwait.

Sebelum penandatanganan resmi perjanjian Oslo I, kedua belak pihak yang berkonflik menandatangani “Surat Pengakuan Bersama”, dimana PLO setuju untuk mengakui negara Israel, dan pihak Israel mengakui peran PLO sebagai “wakil rakyat Palestina” dengan syarat PLO melepaskan terorisme dan juga mengakui hak Israel untuk hidup damai. Selanjutnya pada tanggal 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin dan Negisiator PLO Mahmoud Abbas menandatangani Deklarasi Prinsip-prinsip Pengaturan Diri Sendiri Sementara, yang biasa disebut “Persetujuan Oslo” di Gedung Putih. Deklarasi Prinsip-prinsip Pengaturan Diri Sendiri Sementara tersebut yang membentuk Dewan Legislatif Palestina (pada dasarnya, parlemen yang dipilih secara bebas) dan menetapkan parameter untuk penarikan bertahap dari Pasukan Israel dari Gaza selama periode lima tahun.

3.1.2 Perundingan Oslo II

Untuk menindak lanjuti agenda yang terdapat pada perundingan Oslo I, maka pihak Amerika Serikat sebagai mediator dan pihak-pihak terkait melangkah pada perundingan Oslo II yang terjadi pada dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1995. Dalam perundingan Oslo II tersebut mencakup diskusi tentang masa depan pemerintahan kota Yerusalem, dimana kedua belak pihak negara berkonflik mengklaim Yerusalem sebagai Ibukota masing-masing negara, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perbatasan, keamanan, hak masing-masing negara, dan juga status dari pemukiman Israel di Tepi Barat. Selain itu protokol pemilihan bebas untuk kepemimpinan Otoritas palestina juga dibentuk.

Perundingan Oslo yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1995 atas prakarsa pemerintah Amerika Serikat sebagai mediator tersebut, memberikan

Otoritas Palestina, yang mengawasi Gaza dan Tepi Barat, atas kontrol terbatas pada sebagian wilayah. Sementara hal tersebut memberikan keleluasaan terhadap Israel untuk menyaplok lebih banyak wilayah Tepi Barat, dan menetapkan parameter untuk kerjasama ekonomi dan politik antara kedua belak pihak. Pihak Israel juga mengumpulkan pajak dari orang Palestina yang bekerja di Israel yang tinggal di wilayah pendudukan, dan mendistribusikan pendapatan ke Otoritas Palestina. Israel juga mengawasi perdagangan barang dan jasa yang masuk dan keluar dari Gaza dan Tepi Barat. Perjanjian terakhir membagi Tepi Barat menjadi wilayah terpisah di bawah kendali Israel, kontrol Palestina, dan tanggung jawab militer Israel dengan administrasi sipil Palestina, masing-masing. Oslo II juga menyebutkan ketentuan untuk pemilihan, urusan sipil / hukum, dan kerja sama bilateral Israel-Palestina lainnya dalam berbagai masalah. Karena Kesepakatan Oslo tidak memberikan tanggung jawab pemantauan Amerika Serikat, pemerintahan Clinton menyadari bahwa pemerintahannya hanya terbatas untuk meredakan krisis dan membangun Otorita Palestina dengan bantuan ekonomi dan bantuan keamanan.

Namun demikian, berbagai peristiwa mengiringi perjanjian Oslo tersebut, dan mengikis komitmen yang telah dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 1995, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan sebagai penanda pengakuan secara utuh terhadap kedaulatan Israel. Undang-undang tersebut juga diusulkan untuk diadopsi ke Senat, dan mendapat dukungan luar biasa. RUU itu tidak ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Bill Clinton, dan menjadi hukum tanpa tanda tangan Presiden pada tanggal 8 November 1995. Hal tersebut tentu menghambat kedua perundingan yang telah berlangsung, dan juga memperjelas dimana posisi keberpihakan Amerika Serikat selama menjadi mediator dalam perundingan. Presiden Bill Clinton akhirnya menetapkan ketetapan presiden, berupa hukum waiver yaitu pengangguhan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dengan alasan keamanan nasional Amerika Serikat. Pada bulan November 1995, pada bulan yang sama, Rabin dibunuh oleh Yigal Amir, seorang Israel yang menentang Persetujuan Oslo atas dasar agama. Pembunuhan Rabin diikuti oleh serangkaian serangan teroris oleh Hamas, yang merongrong

dukungan untuk Partai Buruh dalam pemilihan pada bulan Mei 1996 Israel. Perdana Menteri baru Benyamin Netanyahu berasal dari Partai Likud, yang secara historis menentang kenegaraan Palestina dan menarik diri dari wilayah-wilayah pendudukan.

3.1.3 *The Wye River Memorandum*

Pasca terbunuhnya Yitzak Rabin, dan pergantian Perdana Menteri baru Israel Benyamin Netanyahu, membuat pemerintahan Clinton melibatkan diri lebih aktif dalam perundingan Israel dengan Palestina. Hal tersebut karena kekhawatiran atas kemungkinan runtuhnya proses perdamaian antara Palestina dengan Israel. Pada bulan Oktober 1998, Clinton menjadi tuan rumah Netanyahu dan Arafat di Perkebunan Sungai Wye, di mana mereka menegosiasikan sebuah perjanjian yang menyerukan penarikan Israel lebih lanjut dari Tepi Barat.

Memorandum bertujuan untuk melanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Interim 1995 di Tepi Barat dan Jalur Gaza (*Oslo II Accord*). Hal itu ditandatangani di Gedung Putih oleh Benjamin Netanyahu dan Yasser Arafat, melalui negosiasi yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, pada tanggal 23 Oktober 1998. Pada tanggal 17 November 1998, 120 anggota parlemen Israel, Knesset, menyetujui Memorandum dengan suara 75-19. Memorandum tersebut memutuskan bahwa itu akan berlaku pada tanggal 2 November 1998, sepuluh hari dari tanggal penandatanganan.

KTT ini dimoderasi oleh Amerika Serikat di Aspen Institute Wye River Conference Centers dekat Wye Mills, Maryland, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton membuka pertemuan puncak di *Wye River Conference Center* di tempat terpencil pada tanggal 15 Oktober 1998, dan kembali setidaknya enam kali untuk menekan Netanyahu dan Arafat untuk menyelesaikan kesepakatan. Dalam desakan terakhir untuk membuat Netanyahu dan Arafat mengatasi rintangan yang tersisa, Clinton mengundang Raja Hussein yang telah memainkan peran masa lalu dalam mengurangi ketegangan antara kedua orang itu, untuk bergabung dalam pembicaraan (New York Times, 1999)

Pada tanggal 18 Desember 1998, pemerintahan Bill Clinton dan Uni Eropa menyatakan rasa puas mereka tentang pelaksanaan fase pertama Memorandum oleh kedua belah pihak. Israel, bagaimanapun, hanya menerapkan tahap 1 dari

penggelaran kembali lebih lanjut *The Further Redeployments* (FRD), yang mengatur pembagian wilayah dan populasi terutama di area West Bank . Namun demikian, memorandum tersebut tidak berjalan baik karena kedua belah pihak menuduh satu sama lain tidak memenuhi tanggung jawab bagiannya di bawah Wye River Memorandum, dan implementasi lebih lanjut dari perjanjian tetap tidak selesai.

3.1.4 *Camp David Summit 2000*

Berbagai upaya telah dilakukan dari perjanjian Oslo II pada tahun 1995 sampai dengan *Wye River Memorandum* pada tahun 1998, untuk mempercepat penarikan dan ketentuan pemerintahan sendiri yang tertuang pada perjanjian Oslo. Kemudian pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton berusaha mengatasi masalah status akhir yaitu mencakup masalah perbatasan, Yerusalem dan pengungsi.

Pada bulan Juli 2000, atas undangan Presiden Bill Clinton, para pemimpin Israel dan Palestina bertemu di Camp David untuk merundingkan masalah status akhir untuk perjanjian perdamaian akhir yang diharapkan antara kedua pihak. KTT itu berlangsung hampir tujuh tahun setelah penandatanganan Perjanjian Oslo I, yang seharusnya mengarah pada kesepakatan akhir dalam lima tahun.

Ketua PLO Yasser Arafat pergi ke Camp David dengan rasa tidak percaya. Hal ini karena Arafat percaya bahwa pertemuan puncak kepemimpinan terlalu dini dan tidak mempercayai Perdana Menteri Israel Ehud Barak, yang telah gagal melaksanakan perjanjian yang ditandatangani sebelumnya dan malah memperluas pemukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki, khususnya di Yerusalem Timur, pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada pendahulu, termasuk Benjamin Netanyahu selama masa jabatan pertamanya. Namun demikian, Presiden Clinton meyakinkannya bahwa Palestina tidak akan disalahkan jika pertemuan itu berakhir tanpa perjanjian, menjanjikan bahwa akan ada "no finger-pointing" (IMEU, 2005) .

Dalam perundingan rahasia sebelum Camp David, para perunding Palestina menawarkan konsesi yang luas di luar konsensus internasional tentang bagaimana garis besar perjanjian perdamaian akan terlihat. Mereka siap, misalnya, untuk menerima aneksasi Israel atas permukiman Yahudi besar di Tepi Barat, sebagai imbalan untuk tanah dengan nilai dan ukuran yang sama di Israel, bukan penarikan Israel sepenuhnya dari Tepi Barat yang diduduki. Mereka juga terbuka untuk

kedaulatan Israel atas sebagian Yerusalem Timur, termasuk Perempatan Yahudi Kota Tua. Berbeda dengan kisah "tawaran murah hati" yang dibuat oleh Perdana Menteri Ehud Barak, pada kenyataannya orang Israel tidak pernah benar-benar membuat penawaran resmi kepada orang-orang Palestina di Camp David, dan tidak mengajukan proposal tertulis. Satu-satunya proposal yang ditawarkan oleh Israel dibuat secara lisan, sebagian besar melalui pejabat Amerika Serikat, dan tidak memiliki rincian. Israel dan Amerika Serikat menekan Arafat untuk menerima proposal yang tidak jelas ini sebagai "akhir untuk negosiasi" sebelum beralih ke perundingan lain yang lebih serius.

Menurut para perunding Palestina, para pejabat Amerika - khususnya, utusan khusus Timur Tengah Dennis Ross-menunjukkan bias yang jelas dalam mendukung Israel. Pejabat Departemen Luar Negeri veteran lainnya yang berpartisipasi dalam perundingan perdamaian di bawah beberapa pemerintahan Amerika Serikat, Aaron David Miller, kemudian akan menulis bahwa para pejabat Amerika Serikat bertindak sebagai "pengacara Israel" daripada pembawa damai.

Pada akhirnya, pertemuan Camp David berakhir tanpa kesepakatan, setelah itu Presiden Clinton memuji "keberanian" Perdana Menteri Barak, dan, bertentangan dengan janji sebelumnya, menyalahkan kegagalan KTT pada Arafah dan Palestina. Narasi sepihak ini dengan cepat berlangsung di Israel dan Amerika Serikat, memungkinkan para pemimpin Israel untuk mengklaim bahwa ada "tidak ada mitra Palestina" untuk perdamaian, dengan konsekuensi jangka panjang untuk semua yang terlibat. Pada bulan Oktober 2000, ketegangan memuncak karena bertahun-tahun negosiasi semakin tidak jelas arahnya, sementara permukiman Yahudi terus berkembang dengan cepat di tanah mereka, hal ini memicu meletusnya intifada Palestina kedua, dipicu oleh kunjungan provokatif oleh pemimpin oposisi Israel-Israel, Ariel Sharon, ke kompleks masjid Noble Sanctuary di Yerusalem. Lima bulan setelah Camp David berakhir, pada bulan Desember 2000, Amerika Serikat mengajukan apa yang disebut "parameter Clinton," yang menjabarkan proposal Presiden Clinton untuk mengakhiri konflik. Namun demikian, pada saat ini peristiwa berputar di luar kendali di lapangan, karena Israel menanggapi dengan kekuatan mematikan terhadap demonstrasi yang sebagian besar tidak bersenjata selama hari-hari pertama Intifada Kedua.

3.2 Pada Masa Kepemimpinan Presiden George W. Bush

Kegagalan Presiden Bill Clinton dalam menangani konflik Palestina dengan Israel mempengaruhi pemerintahan George Walker Bush pada awalnya untuk mempertahankan kebijakan lepas tangan terhadap konflik. Namun demikian, disisi lain George Walker Bush memiliki sedikit keinginan untuk menginvestasikan modal politik dalam upaya menyelesaikan konflik. Berbeda dengan George Herbert Walker Bush, yang memandang dirinya sebagai mediator yang netral dalam politik Timur Tengah yang rapuh, Presiden George Herbert Walker Bush melihat perannya melalui prisma perang melawan teror. Hal ini berkaitan dengan Kebijakan Luar Negeri Presiden George Walker Bush di Timur Tengah yang memicu sentimen negara-negara di Timur Tengah dengan adanya invansi militer sejak tahun 2001 hingga pada akhir kepemimpinannya tahun 2009 terhadap Afghanistan dan Irak yang diindikasikan sebagai tempat bersembunyi dalang dari penyerangan 9/11 sejak terjadinya penyerangan terhadap menara kembaranya yaitu WTC dan pentagon di New York dan Washington DC pada tanggal 9 September 2001. Pada saat itu, wacana tentang terorisme menjadi perhatian Presiden Bush yaitu Osama bin Laden dan tempat berlatihnya ribuan teroris yang tergabung dalam organisasi militant Islam yaitu Al-Qaeda.

Situasi politik luar negeri Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah juga terancam dengan adanya invasi militer yang dilakukan pemerintahan George Walker Bush, dimana pemerintahan George Walker Bush menimbulkan kepada tumbuhnya ketidakpercayaan, dan ketakutan dunia khususnya negara-negara di wilayah Timur Tengah terhadap Amerika Serikat. Maka hal ini menjadi salah satu faktor utama pemerintahan George Walker Bush tidak mengimplementasikan undang-undang terkait pemindahan kedutaan ke Yerusalem, karena hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar terhadap kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat khususnya di wilayah Timur Tengah. Selain hal itu sentimen negara-negara di wilayah Timur Tengah juga semakin besar pasca terjadinya invansi di wilayah Irak, Suriah dan Afgahnistan. Oleh sebab itu, untuk menyikapi konflik antara Palestina dengan Israel, pemerintahan George Walker Bush lebih memilih membuat “perundingan baru” yang lebih aman untuk dilakukan

dibandingkan dengan mengimplementasikan *Jerusalem Embassy Act 1995* pada masa pemerintahannya.

3.2.1 *The Road Map*

Setelah serangkaian perundingan damai yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Bill Clinton yang berujung dengan kegagalan, tidak membuat pemerintahan George Walker Bush mengupayakan perundingan damai untuk kedua negara tersebut. Pemerintahan George Walker Bush dan pemimpin kongres bersikeras tertarik dalam mengejar perjanjian damai

Pada tanggal 24 Juni 2002, Presiden Bush menyerukan "kepemimpinan Palestina yang baru dan berbeda", sehingga negara Palestina bisa dibentuk. Presiden George Walker Bush meminta Palestina untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum untuk membangun demokrasi dan meninggalkan aksi teror. Jika hal tersebut tercapai maka Amerika Serikat menjamin akan memberikan dukungan besar terhadap tercapainya kesepakatan perdamaian antara Palestina dan Israel. Namun, dalam hal ini Presiden Bush tidak menyertakan partisipasi Yasser Arafat sebagai mitra perdamaian.

Setelah pernyataan tersebut, Amerika Serikat kemudian mulai bekerja dengan Uni Eropa, Rusia, dan PBB sebagai bagian dari "Kuartet" untuk membentuk "Peta Jalan" yang mengarah ke penyelesaian perdamaian Palestina dengan Israel. Namun, sementara Amerika Serikat telah menghapus Arafat sebagai mitra yang cocok untuk perdamaian. Dengan demikian, publikasi Road Map akan ditunda hingga tanggal 30 April 2003. Sementara itu, pada bulan September 2002, ketika pasukan Israel mengepung kompleks Arafat di Ramallah setelah serangkaian pemboman bunuh diri yang brutal, Amerika Serikat memilih untuk tidak menggunakan vetonya atas Resolusi PBB yang mengutuk tindakan Israel.

Ketika Road Map akhirnya diterbitkan, itu termasuk tiga fase, yang mengarah ke negara Palestina. Pada tahap pertama, orang-orang Palestina harus "menyatakan akhir yang tegas terhadap kekerasan dan terorisme dan mengakhiri hasutan terhadap Israel dan melakukan upaya nyata di lapangan untuk menangkap, mengacaukan, dan menahan individu dan kelompok yang melakukan dan merencanakan serangan terhadap orang-orang Israel di mana pun." Palestina juga

menunjuk seorang perdana menteri yang "diberdayakan" dan mendirikan pemerintahan yang didasarkan pada demokrasi dan kabinet parlemen yang kuat, yang hanya memiliki tiga layanan keamanan yang akan dilaporkan kepada perdana menteri yang diberdayakan. Untuk bagiannya, Israel harus menahan diri dari deportasi, serangan terhadap warga sipil, dan penyitaan atau pembongkaran rumah dan properti Palestina. Ketika "kinerja keamanan yang komprehensif" dari orang-orang Palestina bergerak maju, Israel harus "menarik secara progresif" dari daerah-daerah yang ditempati sejak tanggal 28 September 2000, membongkar pos-pos pemukiman yang didirikan sejak bulan Maret 2001, dan "membekukan semua aktivitas permukiman.

Arafat menyetujui permintaan untuk menciptakan jabatan perdana menteri, menunjuk pemimpin senior Palestina, Abu Mazen. Namun dengan cepat menjadi jelas bahwa Abu Mazen bukan perdana menteri "yang diberdayakan" yang diinginkan Amerika Serikat, karena Arafat mempertahankan kendali atas sebagian besar pasukan keamanan Palestina. Sementara Otorita Palestina menerima Road Map, Hamas, Jihad Islam, Brigade Martir al-Aksa, dan Tanzim tidak. Israel juga menerimanya, meskipun dengan empat belas pemesanan khusus. Sementara itu, 88 Senator Amerika Serikat menyerang Road Map, mengatakan bahwa mereka tidak mengambil posisi yang cukup kuat terhadap terorisme Palestina.

Presiden George Walker Bush kemudian datang ke Timur Tengah pada tanggal 3 Juni 2003, bertemu di Sharm el-Sheikh dengan Raja Abdullah II dari Yordania, Putra Mahkota Abdullah dari Arab Saudi, Hosni Mubarak dari Mesir, Raja Hamad al Khalifa dari Bahrain, dan Abu Mazen untuk mendapatkan dukungan Arab Saudi untuk Road Map. Keesokan harinya ia bertemu dengan Sharon dan Abu Mazen di Aqaba, Yordania. Namun serangan teroris Palestina berlanjut sampai tanggal 29 Juni 2003, ketika Abu Mazen berhasil memunculkan gencatan senjata 90 hari dari para pemimpin Hamas, Tanzim, dan Jihad Islam, meskipun tidak dari Brigade al-Aksa Martir. Sementara para pemimpin militer Israel khawatir bahwa kelompok-kelompok teroris akan menggunakan gencatan senjata untuk membangun kembali pasukan dan senjata mereka, Israel menarik pasukannya dari Gaza utara dan Bethlehem, menutup beberapa pos pemeriksaan, menutup beberapa pos terdepan ilegal di Tepi Barat, membebaskan beberapa tahanan Palestina, dan

memungkinkan lebih banyak orang Palestina bekerja di Israel. Presiden George Walker Bush juga bertemu dengan Abu Mazen dan Sharon di Washington pada bulan Juli. Namun demikian, tidak ada tindakan keras terhadap teroris oleh Abu Mazen. Pada tanggal 19 Agustus 2003, sebuah pemboman bunuh diri di Yerusalem menewaskan 23 orang Israel, termasuk sejumlah anak-anak, dan melukai 130 orang, menandakan berakhirnya gencatan senjata. Abu Mazen mengundurkan diri pada tanggal 6 September 2003 (CFR, 2007).

3.2.2 *Annapolis Conference*

Pasca gagalnya The Road Map pada tahun 2003, Presiden George Bush Jr mencoba cara lain untuk tetap menjalankan perundingan damai antara Palestina dan Israel. George Bush Jr juga lebih melakukan pendekatan intensif kepada PM Israel Ehud Olmert dan presiden otonomi Palestina Mahmud Abbas. Hal ini dengan mengagas ide untuk melakukan konferensi yang terbuka yang disebut Konferensi Annapolis, dan melibatkan lebih dari 40 negara, tidak seperti sebelumnya. Tujuan konferensi lebih banyak ditekankan pada dilanjutkannya kembali proses perdamaian Timur Tengah. Pada intinya Bush berusaha agar proses perdamaian itu dapat tuntas hingga berakhirnya masa jabatannya. Dengan hal itu, ia ingin menghapus sebagian kegagalan politiknya di Irak, dengan menorehkan catatan sejarah berupa tercapainya perdamaian Timur Tengah.

Konferensi Annapolis adalah konferensi perdamaian Timur Tengah yang diadakan pada tanggal 27 November 2007, di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat. Konferensi ini berfokus untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel dengan Palestina dan menerapkan "*The Roadmap For Peace*". Konferensi berakhir dengan mengeluarkan pernyataan bersama dari semua pihak. Setelah Konferensi Annapolis, negosiasi dilanjutkan.

Terdapat enam agenda dalam konferensi Annapolis yang mencakup berbagai masalah pokok, yaitu masalah kedaulatan Negara Palestina, status akhir Jerusalem sebagai Ibukota masa depan Palestina, perbatasan wilayah Palestina dengan Israel, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber mata air. Kesepakatan penting dalam konferensi Annapolis adalah kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan mekanisme monitoring implementasi peta

jalan, yang isinya pendirian Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan damai bersama Israel. Konferensi ini juga menyepakati pembicaraan berkala mengenai proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina setiap dua minggu sekali dengan Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.

Namun demikian, Konferensi Annapolis pada akhirnya menghadapi kegagalan untuk mencapai kesepakatan damai antara Palestina dengan Israel. Berbagai indikator yang menyebabkan kegagalan pada konferensi Annapolis tersebut seperti pada awal masa konferensi Annapolis memang terjadi gencatan senjata antara pejuang Hamas dan tentara Israel, terutama di Jalur Gaza selama beberapa bulan. Tetapi disaat presiden Palestina Mahmoud Abbas dan perdana menteri Israel Ehud Olmert berunding, pembangunan pemukiman Yahudi di Al-Quds Timur justru ditingkatkan oleh pemerintah Isreal. Selain itu pasca konferensi Annapolis pertengahan tahun 2008 keadaan Palestina dengan Israel konflik mulai bergejolak terutama di daerah Gaza yang merupakan basis kelompok Hamas. Pemberlakuan blokade ekonomi oleh Israel di Gaza membuat banyak warga Gaza menderita kelaparan, kekurangan obat, dan kekurangan sumber-sumber kehidupan, misalnya listrik padam, pembatasan bantuan makanan dari masyarakat internasional dan macetnya distribusi bahan bakar.

3.3 Pada masa Kepemimpinan Presiden Barrack Obama

Kepemimpinan Barack Obama sebagai pengganti George Walker Bush sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, dimana bagaimanapun tetap condong berpihak pada Israel. Namun demikian, hubungan Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah yakni Israel jatuh ke titik terendah pada masa pemerintahan Barack Obama. Selama delapan tahun terakhir pula, Barack Obama dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperlihatkan sikap berseberangan dalam sejumlah isu penting. Hal ini disebabkan sikap Barack Obama yang lebih lunak terhadap negara-negara Timur Tengah lainnya, dan memberikan pernyataan pada saat kampanye bahwa ia akan lebih memperhatikan kepentingan Palestina untuk merdeka. Hal ini sangat berlawanan dengan Presiden sebelumnya yang cenderung lebih mendahulukan kepentingan Israel.

Seperti kedua Presiden sebelumnya, Presiden Barack Obama juga memilih mengangguk *Jerusalem Embassy Act* pada dua periode masa pemerintahannya. Hal ini disebabkan resiko yang lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan jika mengimplementasikan undang-undang tersebut. Keuntungan yang diperoleh jika mengimplementasikan undang-undang tersebut hanya terbatas pada pelaksanaan kepentingan nasional Amerika Serikat yang tertera dalam konstitusional, dan memenuhi kepentingan sekutu Amerika Serikat yakni Israel. Namun *cost* yang dipertimbangkan oleh pemerintahan Barack Obama lebih besar yaitu keputusan pemindahan Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem akan memicu kemarahan negara-negara Timur Tengah. Pada sisi lain, pemerintahan Barack Obama mencoba lebih bersikap lunak terhadap Palestina untuk membangun kepercayaan pihak Palestina agar bersedia melanjutkan proses perdamaian yang selama ini terhambat. Pemerintahan Barack Obama juga berpendapat bahwa mengambil sikap untuk memindahkan Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem bersifat kontraproduktif untuk menemukan solusi dua negara untuk konflik. Maka jalan yang ditempuh oleh Presiden Barack Obama adalah menawarkan solusi perdamaian lanjutan antara kedua negara Palestina dengan Israel.

3.3.1 *Direct Negotiation Between Israel and Palestinians*

Pendekatan pemerintahan Barack Obama terhadap konflik Israel dengan Palestina sebagian besar diambil dari pengalaman yang sama dengan pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya. Amerika Serikat dua kali mengatur perundingan diplomatik tingkat tinggi dengan tujuan kesepakatan dua negara, Israel dan Palestina. Dalam hal ini tidak ada upaya yang mendekati solusi dua negara itu. Barack Obama, seperti kebanyakan pendahulunya, tidak tertarik untuk mengambil pendekatan yang berbeda dan menggunakan pengaruh Amerika Serikat untuk mencoba memaksa Israel untuk membuat konsesi besar. meskipun pada pemerintahannya lebih lunak terhadap palestina, namun hal tersebut tidak berarti apa-apa.

Pada masa kepemimpinan Presiden Barrack Obama upaya mediasi Amerika Serikat terhadap konflik Palestina dengan Israel melalui mekanisme negosiasi langsung (*Direct Negotiation Between Israel and Palestinians*) pada tanggal 2

September 2010. Mediasi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat ini dijalankan melalui forum tripartit yang terdiri dari tiga perwakilan, yakni Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebagai fasilitator negosiasi langsung, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai wakil dari Israel dan Mahmoud Abbas sebagai wakil dari ketua otoritas Palestina.

Prakarsa Barack Obama yang diharapkan dapat menjadi perundingan akhir ke arah perdamaian ternyata mengalami kegagalan seperti halnya perundingan-perundingan sebelumnya. Negosiasi langsung antara Israel dan Otoritas Nasional Palestina telah berlangsung sejak bulan September 2010 sebagai bagian dari proses perdamaian, antara Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Ketua Otorita Palestina Mahmoud Abbas. Tujuan akhir dari negosiasi langsung adalah mencapai "penyelesaian status akhir" resmi untuk konflik Israel dengan Palestina dengan menerapkan solusi dua negara, dengan Israel tetap menjadi negara Yahudi, dan pembentukan negara bagi rakyat Palestina.

Pada awal tahun 2010, Benjamin Netanyahu, memberlakukan moratorium sepuluh bulan pada pembangunan permukiman di Tepi Barat sebagai syarat untuk Otoritas Palestina, setelah sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungannya untuk masa depan negara Palestina, namun ia bersikeras bahwa Palestina akan perlu membuat gerakan timbal balik mereka sendiri. Otorita Palestina menolak syarat itu tidak cukup. Sembilan bulan kemudian, negosiasi langsung antara Israel dan Palestina diluncurkan kembali, setelah hampir dua tahun mengalami kebuntuan. Pada awal September, koalisi 13 faksi Palestina memulai kampanye serangan terhadap warga sipil Israel, termasuk serangkaian penembakan dan serangan roket ke kota-kota Israel, dalam upaya untuk menggagalkan perundingan yang sedang berlangsung (The Guardian, 2017).

Pembicaraan langsung terjadi pada akhir bulan September 2010 ketika moratorium parsial Israel pada pembangunan permukiman di Tepi Barat berakhir dan Benjamin Netanyahu menolak memperpanjang pembekuan kecuali Otorita Palestina mengakui Israel sebagai Negara Yahudi, sementara pimpinan Palestina menolak melanjutkan perundingan kecuali jika Israel memperpanjang moratorium. Proposal itu ditolak oleh pemimpin Palestina, yang menekankan bahwa topik

tentang negara Yahudi sama sekali tidak berkaitan dengan moratorium. Keputusan Benjamin Netanyahu tentang pembekuan dikritik oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Meskipun Amerika Serikat turut mengkritik keputusan Benjamin Netanyahu tersebut, namun diluar negoisasi Barrack Obama sering memihak Pemerintah Israel dengan cara lain. Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer untuk Israel, terutama untuk sistem anti-rudal Iron Dome. Selama bentrokan besar-besaran Israel dengan Hamas pada tahun 2012 dan tahun 2014, Amerika Serikat secara retorik mendukung hak Israel untuk membela diri. Barack Obama dan Benjamin Netanyahu memang memiliki hubungan terburuk dari setiap presiden Amerika Serikat dan perdana menteri Israel pendahulunya, tetapi hubungan strategis yang mendasarinya tidak mengubah sedikit pun. Bantuan dan dukungan Amerika Serikat terus mengalir ke Israel. Kedua pemimpin tersebut berulang kali tidak sependapat tentang isu-isu kebijakan inti seperti proses perdamaian dan negosiasi nuklir dan kesepakatan dengan Iran, tetapi aliansi Israel dan Amerika Serikat tetap sama. Pada tahun terakhir jabatannya, kedua pemerintah sedang merundingkan komitmen baru untuk bantuan puluhan miliar dolar militer Amerika Serikat ke Israel (CNN Indonesia, 2016).

3.4 Pada masa Kepemimpinan Presiden Donald Trump

Terpilihnya Presiden Donald Trump menggantikan Barrack Obama menjadi titik balik dari kebijakan Amerika Serikat tentang perdamaian Palestina dengan Israel. Presiden yang diusung dari Partai republik tersebut memiliki kebijakan yang ekstrim dan berbanding terbalik dengan yang telah dilakukan Presiden sebelumnya, hal ini didasari kedekatannya dengan kaum Kristen Evangelis dan juga sikap politiknya yang pro Israel. Hal ini dibuktikan dengan janji kampanye yang diutarakan Donald Trump pada para pelobi Israel, tentang usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Isarel, dan juga memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan terkait rencana pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem diwujudkan Perseiden Donald Trump secara terbuka pada bulan Desember 2017. Hal ini mengejutkan banyak pihak, terlebih lagi pihak Palestina.

Banyak pihak yang menentang dengan keputusan tersebut, hingga dikeluarkannya Resolusi DK PBB sebagai upaya penghentian Keputusan tersebut, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Langkah yang diambil Donald Trump merupakan perwujudan dari konstitusi yang sudah ada sejak 1995, yakni pengesahan undang-undang agar Amerika Serikat mesti memulai pendanaan dan pemindahan kedutaan besar negara dari Tel Aviv ke Yerusalem, paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1999. Realisasi UU ini juga berlaku sebagai tanda penghormatan untuk kebijakan Israel yang memutuskan Yerusalem sebagai ibukota mereka. Meskipun demikian, Undang-undang tersebut belum terealisasi sepanjang masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, hingga Barrack Obama. Mereka semua memilih menanggukkan undang-undang tersebut dengan pertimbangan utamanya adalah dampak yang akan dihasilkan bersifat negatif baik untuk keamanan nasional Amerika Serikat maupun kestabilan Timur Tengah. Demi menghindari konflik baru, tiap enam bulan mereka menggunakan hak penolakannya dengan menandatangani surat khusus.

Tindak lanjut dari keputusan yang diambil oleh Presiden Donald Trump adalah mengupayakan agar pihak Palestina menyetujui untuk rencana perdamaian yang disebut "kesepakatan abad ini" yang masih dalam tahap perumusan. Hal ini berkaitan dengan penggabungan misi diplomatik Palestina dengan Kedutaan besar Israel yang dilakukan oleh Amerika Serikat pasca penutupan kantor diplomatik PLO di Amerika Serikat (AA, 2018). Selain itu pihak Amerika Serikat juga menekan dengan berbagai cara salah satunya dengan memangkas biaya bantuan untuk Palestina. Hal ini dilakukan agar Palestina bersedia bergabung dalam perundingan perdamaian yang masih dalam tahap perencanaan dan akan dikeluarkan pihak Presiden Donald Trump pada 2019 tersebut. Namun berbagai upaya yang dibuat oleh Presiden Donald Trump sampai saat ini belum memberikan hasil untuk mewujudkan perdamaian Palestina dengan Israel, dan semakin membuat konflik antara kedua negara tersebut berlanjut.

BAB 4. RASIONALITAS KEPUTUSAN PRESIDEN DONALD TRUMP MENGAKUI YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Palestina dengan Israel telah menjadi bagian penting dari agenda politik luar negeri Amerika Serikat. Hal ini meliputi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya adalah dengan mempertahankan eksistensi negara Israel. Namun dalam usaha Amerika Serikat mempertahankan eksistensi Israel, ada hal penting yang harus dipertimbangkan Amerika Serikat yakni menyelesaikan konflik dengan negara bersengketa yakni Palestina. Pasca kemenangan Amerika Serikat dan Israel pada perang 1967, Amerika Serikat memiliki gagasan untuk membuat perjanjian damai dengan negara di kawasan Timur Tengah yang diawali dengan perjanjian Camp David. Selanjutnya memasuki era baru, Amerika Serikat mulai menggagas perdamaian dengan Palestina yang dimulai pada tahun 1993 yang menghasilkan perjanjian Oslo. Namun berbagai upaya perdamaian yang ditempuh Amerika Serikat sangat sulit untuk di wujudkan, mengingat sikap bias Amerika Serikat yang lebih mengutamakan kepentingan Israel daripada Palestina.

Selain itu dengan adanya Konstitusi tentang Yerusalem yang dibuat pada tahun 1995 tentang pengakuan wilayah Yerusalem sebagai bagian dari Israel, maka Presiden terpilih juga harus mempertimbangkan mandat yang tertera dalam konstitusi tersebut. Sehingga memberikan dilema bagi Amerika Serikat yang berperan sebagai mediator dan terlibat dalam berbagai agenda pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel. Selain itu kepercayaan Palestina terhadap netralitas sikap Amerika Serikat semakin tergerus dengan semakin terbukanya dukungan Amerika Serikat terhadap kepentingan Israel, sehingga mempersulit terjadinya perdamaian antara Palestina-Israel. Namun demikian, sejak undang-undang tersebut disahkan pada era Presiden Bill Clinton, undang-undang tersebut faktanya ditangguhkan oleh Presiden Bill Clinton. Selain itu pada periode selanjutnya undang-undang tersebut juga di tangguhkan oleh Presiden George Walker Bush dan Presiden Barrack Obama dengan dalih keamanan nasional Amerika Serikat.

Namun pada tahun 2017, terjadi pernyataan yang mengejutkan yang dikeluarkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, tentang keputusannya mengakui wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Keputusan tersebut tentu sangat bertentangan dengan kesepakatan perdamaian yang dikehendaki selama ini. Selain itu, keputusan yang juga tertera dalam undang-undang tersebut untuk pertama kali dilaksanakan oleh Presiden Amerika Serikat terpilih, setelah sebelumnya ditanggguhkan oleh Presiden pendahulunya. Meskipun menjadi polemik dan pertentangan oleh beberapa negara, namun hal tersebut tidak mempengaruhi upaya Donald Trump untuk merealisasikan keputusannya, yakni dengan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan tersebut didasari berbagai pertimbangan yang sesuai dengan pemikiran rasional Donald Trump sebagai pembuat kebijakan.

Dalam bab ini, penulis menjabarkan terkait dengan keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, yang diproklamkan secara internasional pada tahun 2017. Selanjutnya, juga akan dijabarkan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pertimbangan Presiden Donald Trump selaku Kepala Negara dan pengambil keputusan. Aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel tersebut akan penulis jelaskan pada sub bab berikut.

4.1 Merealisasikan *Jerusalem Embassy Act 1995*

Pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu merupakan kontestasi politik yang mengejutkan, hal ini karena bergabungnya Donald Trump sebagai tokoh yang cukup kontroversial dari partai republik yang secara langsung melawan Hillary Clinton dari partai Demokrat. Pada pemilihan presiden tahun 2016 tersebut menawarkan visi berbeda dan sering bersaing mengenai berbagai isu, seperti ekonomi, militer, kebijakan luar negeri, dan isu-isu domestik lainnya. Polarisasi antara partai Republik dan Demokrat juga terjadi pada saat pemilu (MEE, 2016).

Salah satu yang menarik dari pemilihan umum 2016 yaitu adalah kedua kandidat tersebut seringkali memiliki visi yang bertolak belakang, namun kedua kandidat tersebut kompak untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel, sementara seringkali mengesampingkan hak Palestina. Hal ini terlihat jelas dalam

visi mereka di ranah kebijakan luar negeri, khususnya yang menyangkut konflik Palestina-Israel. Pihak dari partai Demokrat maupun Republik sepakat dengan visi yang sama, yaitu, Israel akan diberi dukungan finansial, militer dan diplomatik tanpa syarat, dan pihak Palestina sering di kesampingkan atau tidak pernah ditangani secara substansial, dan tetap mempertimbangkan kepentingan keamanan Israel dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Selain itu sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun kandidat calon presiden yang akan maju, selalu ada campur tangan pelobi AIPAC dan harus menyertakan kepentingan Israel meskipun disisi lain Amerika Serikat juga menjadi mediator dari konflik Palestina dengan Israel.

Namun yang menarik adalah pernyataan yang dilontarkan Donald Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2016 lalu di hadapan Komisi Urusan Luar Negeri Amerika Serikat-Israel (Detik, 2017), berikut pernyataannya :

“Saat saya menjadi Presiden, hari-hari memperlakukan Israel seperti warga kelas dua akan berakhir pada hari pertama. Kita akan memindahkan Kedutaan Amerika ke ibu kota abadi warga Yahudi, Yerusalem,”

Visi Donald Trump tersebut merupakan terobosan baru yang belum pernah terealisasi oleh presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pernyataan tersebut kemudian masuk kedalam janji politik Donald Trump. Hal tersebut tentu menarik simpatisan Yahudi pro-Israel, salah satunya yang berpengaruh pada masa kampanye Donald Trump yakni Sheldon Adelson, yang memberikan dana dukungan pada partai Republik sebesar 82 juta US dollar untuk pemilu 2016, demi mendukung pandangannya terhadap Israel. Sumbangan dana tersebut tentu membantu pihak Donald Trump, hal ini dikarenakan pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu, Hillary Clinton lebih mendominasi dana kampanye, hal ini meliputi dana kas tunai Hillary sebesar USD62 juta atau setara dengan Rp809,57 miliar dan sumbangan 1 miliar US dollar atau setara dengan Rp13,05 triliun, yang diperoleh dari para donatur pengusaha

besar pro-Hillary yang menginvestasikan uangnya melalui Super-PAC (*Political Action Committee*) yaitu sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan kampanye, baik terhadap kandidat calon Presiden maupun calon kepala daerah di Amerika Serikat. Sedangkan pada saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu, dana kas tunai Donald Trump hanya seperempat dari tim Hillary, yaitu USD16 juta atau berkisar Rp208,92 miliar, yang berasal dari dana pribadinya, dan sumbangan yang diperoleh dari Super-PAC pro-Trump yang hanya berkisar USD59,1 juta alias Rp770,94 miliar. Maka dana sumbangan tunggal yang diberikan oleh Sheldon Adelson membantu menyokong kebutuhan kampanye pihak Donald Trump, sebesar lima puluh persen dari jumlah dana kampanye. Dana kampanye tersebut dihabiskan sebanyak USD50,1 juta atau Rp654,19 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari USD30 juta (Rp391,73 miliar) untuk belanja media dan USD1,7 juta untuk membayar tim suksesnya (SindoNews, 2016).

Antusiasme yang ditunjukkan Sheldon terhadap janji politik Donald Trump tersebut didukung dengan komitmen Donald Trump yang akan mendahulukan kepentingan Amerika Serikat. Bahkan Sheldon Adelson memberikan pernyataan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa Donald Trump akan menjadi presiden yang luar biasa manakala menyangkut kepentingan Israel. Selain itu Sheldon juga mengupayakan kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton melalui kantor berita *Associated Press*, yang mengirim email ke lebih dari 50 anggota Koalisi Yahudi Republik, dimana ia meminta mereka untuk mendukung Trump sebagai calon Presiden dari Partai Republik (JPOST, 2016). Pengaruh tersebut juga mempengaruhi kuatnya suara pemenangan Donald Trump di kalangan *Electoral College*, mengingat dalam konstitusi Amerika Serikat diatur bahwa proses pemilu tidak secara langsung dipilih oleh rakyat, melainkan melalui perwakilan elector pada setiap negara bagian. Meskipun pada dasarnya populer vote Hillary Clinton lebih unggul di masyarakat. Komitmen yang dibuat Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, telah berdampak terhadap proses pemenangannya untuk meraih kursi Presiden Amerika Serikat. Adanya janji kampanye untuk merealisasikan pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem seperti yang tertuang dalam *Jerusalem Embassy Act 1995*, memperkuat basis politiknya, dengan adanya dukungan pihak Kristen Evangelis dan Yahudi pro-

Israel. Pertimbangan yang dihadapi Presiden Donald Trump jika tidak memperlihatkan komitmennya menyangkut kepentingan luar negeri Amerika Serikat terkait Yerusalem adalah proses pemenangannya akan terhambat. Hal ini karena dari segi dana kampanye dan “*vote popularity*” pihak Hillary Clinton jauh lebih unggul dari Donald Trump. Dana kampanye yang terbatas dari dana pribadi dan dana Super-PAC pun tidak akan memenuhi kebutuhan kampanye Donald Trump untuk melawan survei Hillary Clinton yang mempengaruhi tanggapan masyarakat.

Sebagai upaya untuk memenuhi janji kampanye dan merealisasikan kepentingan luar negeri Amerika Serikat menyangkut Yerusalem, maka Presiden Donald Trump mulai membuka pembicaraan untuk melaksanakan komitmennya memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari kalangan pro-Israel, kelompok sayap kanan, termasuk kalangan Kristen Evangelis di Amerika Serikat yang membantunya memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 2016. Presiden Donald Trump melihat isu soal Yerusalem sebagai kunci untuk mengamankan basis politiknya. Hal ini sebagai bukti bahwa komitmen Presiden Donald Trump tidak sama seperti Presiden-presiden Amerika Serikat terdahulu yang juga melontarkan janji untuk memindahkan Kedubes Amerika Serikat ke Yerusalem semasa kampanye. Namun saat mereka menjabat, mereka memilih mengesampingkan janji kampanye itu karena alasan dapat mengganggu kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, juga status Yerusalem yang masih diperebutkan oleh Israel dan Palestina.

Hal ini menjadi fokus dunia internasional, karena akan mempengaruhi proses perdamaian Israel dengan Palestina. Namun demikian, komitmen yang diutamakan oleh Presiden Donald Trump adalah mewujudkan visi politiknya dengan mendeklarasikan terkait rencana pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017. Adanya keputusan tersebut sekaligus pengakuan sepihak terhadap wilayah Yerusalem sebagai wilayah Israel. Sejak keputusan ini ditetapkan, tentu mendapat banyak kritikan dari dunia internasional. Berbagai negara menolak keputusan tersebut, dan mengecam keputusan Donald Trump itu, namun Donald Trump tetap pada keputusannya dan juga meyakini bahwa Amerika Serikat memiliki kapasitas yang besar untuk tetap

dapat mengimplematisakn keputusan tersebut. Selain itu, Donald Trump sejak masa kampanye nya fokus terhadap slogan yang dibuat yaitu *American First* , dengan mendahulukan kepentingan Amerika Serikat dalam setiap setiap permasalahan politik luar negeri.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Donald Trump telah dipertimbangkan berdasarkan adanya pengaruh situasi politik domestik yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan terpilihnya dia menjadi Presiden yang dipengaruhi dukungan pelobi yahudi yakni Sheldon Adelson dan juga kalangan pro-Israel, kelompok sayap kanan, termasuk kalangan Kristen Evangelis di Amerika Serikat. Maka pelaksanaan janji politik terkait pengambilan keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel merupakan terobosan baru yang ditunggu-tunggu oleh para Pro-Israel. Selain itu disebabkan tingkat kepuasan warga Amerika Serikat terhadap Donald Trump yang merosot dibanding pada saat memenagi pemilu pada tahun 2016 dengan menyisakan 34 persen pada bulan November 2017 (KOMPAS, 2017). Kemerosotan tersebut dipicu dengan masih banyaknya janji kampanye yang belum terealisasi dan berbagai skandal yang ditujukan pada Donald Trump. Oleh karena itu Donald Trump membutuhkan peredam kegaduhan dari berbagai masalah dalam negeri yang dihadapinya, salah satunya dengan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat pendahulunya, yakni dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Selain itu, keputusan Presiden Donald Trump tentang pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel pada dasarnya telah ditetapkan oleh konstitusi Amerika Serikat yang terdapat pada *Jerusalem Embassy Act* tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan kedutaan sekaligus pengakuan wilayah Yerusalem sebagai ibukota Israel merupakan salah satu kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Dalam pelaksanaannya, Presiden Donald Trump mempertimbangkan aspek politik dalam merealisasikan keputusan ini, karena dirasa waktu yang tepat untuk melaksanakan mandat yang harus dilakukan oleh presiden. Undang-undang ini pada awalnya di bentuk oleh Senat tanpa persetujuan Presiden yang menjabat saat itu, yakni Bill Clinton. Kongres meloloskan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 dengan

mayoritas bipartisan luar biasa baik di DPR maupun Senat. Presiden Bill Clinton sempat menandatangani pengesahan undang-undang tersebut, namun pada akhirnya Bill Clinton menyetujui pengesahan undang-undang tersebut dengan syarat Presiden dapat melakukan penundaan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan alasan keamanan nasional Amerika Serikat. Poin penting terkait undang-undang yang disahkan tahun 1995 tersebut adalah Presiden Amerika Serikat yang terpilih harus segera memindahkan Kedutaan Besar nya ke Yerusalem selambat-lambatnya terealisasi pada tahun 1999, namun dapat melakukan penundaan apabila situasi keamanan nasional Amerika Serikat dapat terganggu (The Washington Post, 2017).

Terdapat beberapa poin penting dalam *Jerusalem Embassy Act* yang menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besar nya ke Yerusalem. Poin Pertama , yaitu pihak pemerintah Amerika Serikat mengasumsikan bahwa Yerusalem merupakan wilayah Israel, terhitung pada tahun 1967, kota Yerusalem disatukan kembali selama konflik yang dikenal sebagai Perang Enam Hari. Poin Kedua, adalah pernyataan kebijakan Amerika Serikat tentang Yerusalem yang harus menjadi kota yang tidak dapat dibagi, dan juga harus diakui sebagai Ibukota Negara Israel. Selain itu juga mengatur tentang batas waktu pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1999. Poin Ketiga, menjelaskan tentang perencanaan pendanaa bagi Israel dalam jangka panjang, untuk menyokong sekutu dekat Amerika Serikat tersebut. Poin Keempat, merupakan laporan pelaksanaan, Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diberlakukannya undang-undang ini, Menteri Luar Negeri harus menyerahkan laporan kepada Pembicara Dewan Perwakilan Rakyat dan Komite Luar Negeri Hubungan Senat merinci rencana Departemen Luar Negeri untuk menerapkan undang-undang ini. Hal ini juga termasuk merencanakan semua biaya yang terkait dengan pembentukan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel di ibu kota Yerusalem. Poin Kelima, laporan semua tahun, yaitu setiap enam bulan sesudahnya, Sekretaris Negara harus melaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada kemajuan yang dibuat untuk membuka Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem. Poin Keenam, terkait dengan *Presiden Waiver*, yaitu Presiden dapat

menanggihkan batasan yang ditetapkan untuk jangka waktu enam bulan jika ia menentukan dan melaporkan ke Kongres sebelumnya bahwa penanggihan semacam itu diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan Amerika Serikat. Presiden dapat menanggihkan pembatasan tersebut untuk tambahan periode enam bulan pada akhir setiap periode selama penanggihan berlaku di bawah ayat ini jika Presiden menentukan dan melapor ke Kongres sebelum penanggihan tambahan bahwa penanggihan tambahan diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan Amerika Serikat (Government, 1995).

Namun dalam pelaksanaannya, Presiden pendahulu Donald Trump lebih memilih zona aman, dengan dalih mempertimbangkan keamanan nasional Amerika Serikat dan juga mempertimbangkan keputusan tersebut, apabila ditempuh maka dapat merusak kesepakatan damai antara Palestina –Israel. Maka dari masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton hingga Presiden Barrack Obama lebih memilih menerapkan *Presiden Waiver* untuk tidak mengimplementasikan undang-undang dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait pemindahan keduaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem.

Langkah yang ditempuh oleh presiden sebelumnya dalam merespon ketentuan konstitusi, tentu berbeda dengan pandangan Donald Trump, yang memilih untuk melaksanakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Donald Trump dengan pertimbangan politik bahwa memang sudah seharusnya Presiden melaksanakan mandat yang tertera dalam konstitusi yang telah disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan oleh Erwin Chemerinsky yang berkaitan dengan perumusan kekuasaan Presiden Amerika Serikat, yang merujuk pada poin pertama adalah Presiden tidak memiliki *inherent power* atau kekuasaan yang melekat, dimana seperti yang dijelaskan bahwa Presiden Amerika Serikat dapat bertindak hanya jika ada konstitusi yang tegas atau sesuai dengan otoritas hukum yang ada (Chemerinsky, 2006: 48). Hal ini merujuk kepada keputusan pengakuan Yerusalem sebagai wilayah Israel yang telah tertera dalam Jerusalem Embassy Act 1995, dan menjadi sebuah konstitusi yang sah.

Dalam pelaksanaannya, Donald Trump mempertimbangkan situasi politik di Timur Tengah sekaligus mempertimbangkan keamanan nasional Amerika Serikat yang cenderung kondusif untuk mengimplementasikan Jerusalem Embassy Act

pada masa pemerintahannya. Hal ini ditinjau dari melemahnya musuh-musuh Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Irak dan Yaman, dimana negara-negara tersebut mengalami instabilitas kawasan akibat perang. Meskipun masih tersisa Iran sebagai negara musuh Amerika yang berpotensi menghambat kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, namun pihak Amerika Serikat sejauh ini masih bisa menekan Iran dengan keluar dari kesepakatan nuklir, dan membentuk aliansi dengan Arab Saudi dan Israel untuk membendung pengaruh Iran di Timur Tengah.

Selanjutnya dalam mengimplementasikan konstitusi, Donald Trump melakukan beberapa tahap untuk melakukan pemindahan kedutaan ke Yerusalem sekaligus mengakui Yerusalem sebagai wilayah otoritas Israel. Tahap pertama yang dilakukan Donald Trump adalah membuat pernyataan dengan mengadakan konferensi pers secara Internasional terkait keputusannya untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, sekaligus sebagai pernyataan implisit terkait pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Tahap kedua, adalah perencanaan pembangunan dan pemindahan kedutaan Amerika Serikat yang dilakukan secara bertahap. Tahap Ketiga, pemindahan dan peresmian gedung kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem pada tanggal 14 Mei 2018. Tahap Keempat, perencanaan untuk membahas solusi perdamaian antara kedua negara yang berkonflik yaitu Palestina dan Israel, mengingat sampai saat ini Amerika Serikat masih menjadi berperan menjadi bagian mediator konflik Palestina dengan Israel tersebut.

4.2 Peta Politis di Timur Tengah

Timur Tengah merupakan wilayah geografis majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, mazhab dan ras, dan merupakan tempat lahir agama-agama Tuhan. Karakteristik ini, selain posisi geopolitik dan cadangan melimpah minyak dan gas, membuat wilayah Timur Tengah semakin urgen. Sejak awal abad ke-20, terutama pasca berakhirnya perang dunia pertama dan kedua, posisi geopolitik Timur Tengah sangat penting dalam kebijakan luar negeri Inggris, kemudian Amerika Serikat. Bahkan proses pembangunan negara-bangsa atau nation state di kawasan, penentuan perbatasan negara dan jaminan keamanan penguasa kawasan, dilakukan

oleh kekuatan adidaya Barat. Tidak diragukan, pembentukan sebuah kawasan bernama Timur Tengah adalah hasil dari penjajahan Inggris dan Perancis. Berdasarkan perjanjian Sykes Picot tahun 1914, dibentuk sebuah wilayah geografis baru sesuai peta penjajah. Tolak ukur pendirian negara-negara baru dan perbatasan di Timur Tengah, ditentukan sedemikian rupa sehingga bisa menjamin kepentingan imperialis. Artinya, Pembagian wilayah yang dipaksakan itu membuka kemungkinan pecahnya krisis-krisis abad ke-20 di Timur Tengah.

Konflik Arab dengan rezim Zionis Israel, perang Irak dengan Kuwait, sengketa perbatasan Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab, konflik mazhab di Saudi dan Bahrain, serta krisis-krisis serupa lainnya, semua merupakan dampak geopolitik penjajah di kawasan Timur Tengah. Disintegrasi Palestina dan terbentuknya rezim penjajah Israel tahun 1948 dapat dianggap sebagai puncak intervensi kubu imperialis di Timur Tengah yang selamanya menjadi sumber ketegangan dan krisis di wilayah ini. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki pandangan lain dalam melihat potensi wilayah Timur Tengah dan kekhawatiran wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh kekuatan lawannya yakni Uni Soviet. Hal tersebut membuat Amerika Serikat semakin giat untuk memperkuat posisi Israel, sebagai negara yang memiliki faktor geopolitik yang sangat penting untuk membuat pengaruh di wilayah Timur Tengah. Salah satu sumbangsih besar Amerika Serikat adalah membantu perekonomian dan persenjataan Israel untuk melindungi keamanan Israel, dan untuk melawan negara-negara Timur Tengah lain dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967.

Selanjutnya sejak kemenangan yang diperoleh Israel, Amerika Serikat berkontribusi penuh dalam pembangunan negara Israel, baik dari segi ekonomi, politik dan militer dengan merencanakan anggaran bantuan Amerika Serikat pada Israel. Amerika Serikat juga menjembatani kesepakatan damai pertama yang tertuang dalam Perjanjian Camp David untuk membuat kesepakatan damai negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania yang bersinggungan langsung dengan Israel.

Namun yang terjadi pada era baru, Proyek Timur Tengah Raya yang digagas Amerika awal tahun 2003 menggunakan dalih perang melawan terorisme dan penghancuran senjata kimia Saddam Hussein, dan dimulai dari perang Irak. Dalam

strategi ini, jargon-jargon semacam demokrasi, kebebasan, pembangunan dan reformasi lantang disuarakan. Konflik etnis dan sengketa perbatasan yang diciptakan oleh perjanjian Sykes Picot, sejak lama sudah membuka peluang yang menjanjikan bagi intervensi kekuatan-kekuatan transregional.

Proyek Timur Tengah Raya pada kenyataannya adalah simbol upaya pembagian wilayah Timur Tengah. Dukungan Amerika atas konflik internal di sejumlah negara adalah salah satu opsinya. Amerika memanfaatkan setiap konflik internal di negara-negara Muslim dengan maksud untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Kajian transformasi negara-negara Muslim menunjukkan bahwa Barat sedang menjalankan strategi disintegrasi dan melemahkan negara-negara dunia. Menariknya, dalam proses menjadikan Timur Tengah seperti wilayah Balkan, Irak sebenarnya bukanlah target pertama. Sebelumnya di tahun 2011, proses disintegrasi Sudan terjadi akibat tekanan bertahun-tahun Amerika dan langkah pertama yang dilakukan Sudan Selatan adalah mengakui secara resmi negara Israel. Libya dan Yaman merupakan target berikutnya dalam daftar domino upaya disintegrasi yang dilancarkan Amerika dan Israel di kawasan.

Instabilitas kawasan Timur Tengah yang terjadi selama bertahun-tahun menjadi pertimbangan bagi Presiden Donald Trump untuk mulai mengimplementasikan kepentingan Amerika Serikat, salah satunya terkait pengakuan terhadap wilayah Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini disebabkan negara-negara di Timur Tengah mengenyampingkan persoalan konflik Palestina dengan Israel akibat dari domino disintegrasi yang dilakukan Amerika Serikat selama ini. Disintegrasi yang dilakukan Amerika Serikat selama ini juga melumpuhkan kekuatan negara-negara yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat seperti Suriah, Irak, Yaman. Selain itu terjadi perubahan pasca terpilihnya Presiden Donald Trump terkait dengan hubungannya dengan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini seperti hubungan Amerika Serikat dengan Israel yang semakin akrab dengan adanya keputusan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel, lalu hubungan Amerika Serikat dengan Turki yang berangsur membaik terkait pertemuan antara kedua Kepala Negara yakni Presiden Donald Trump dengan Presiden Erdogan di Washington untuk membahas terkait

permasalahan Suriah. Selain itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab puas dengan pendekatan garis keras administrasi Trump terhadap Iran. Serta Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sissi, telah jelas mendukung kepemimpinan Donald Trump yang tidak menyinggung persoalan tentang hak asasi manusia (The Washington Post, 2019).

Terkait pergeseran peta geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tersebut, maka resiko yang dihadapi Presiden Donald Trump dalam mengimplementasikan *Jerusalem Embassy Act* juga terbatas pada pertentangan yang bersifat normatif dari berbagai negara, khususnya negara di kawasan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membendung keputusan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang dilakukan Presiden Donald Trump. Melemahnya peran negara-negara Timur Tengah untuk melawan keputusan Presiden Donald Trump disebabkan masing-masing dari negara di Timur Tengah berfokus terhadap permasalahan yang terjadi di negaranya, dan dalam penyelesaian konflik yang terjadi cenderung bergantung kepada peran negara Amerika Serikat. Keputusan yang dilakukan Presiden Donald Trump dalam hal ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan proyek pembuatan peta baru Timur Tengah yang pernah dibuat pada masa kepemimpinan Presiden George Bush. Karena dengan pemindahan kedutaan tersebut, sekaligus sebagai simbol pengakuan terhadap legitimasi wilayah Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Hal ini tentu membuat Israel semakin kuat untuk menjadi negara induk Amerika Serikat yang dapat memberikan pengaruh besar pada iklim politik Timur Tengah, sekaligus melemahkan legitimasi Palestina di wilayah tersebut.

Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sendiri terikat dengan faktor ideologis yang sama dan juga kepentingan Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Israel bagi Amerika Serikat adalah benteng untuk mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Hal ini karena kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat sangat besar di Timur Tengah. Adanya Israel yang berperan seperti negara duplikat Amerika Serikat di wilayah itu, tentu menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk mengembangkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Selain itu akan mempermudah Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingan di wilayah Timur Tengah, yang telah dibuat oleh Menteri

Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice pada masa pemerintahan Presiden George Bush Jr pada tahun 2006 di Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice bersama Perdana Menteri Israel Ehud Olmert saat itu memperkenalkan proyek “Timur Tengah Baru” yang diperkenalkan secara terbuka oleh Washington dan Tel Aviv dengan memulainya dari Lebanon, dengan harapan akan menciptakan tekanan dan instabilitas kawasan dan juga merubah nya menjadi era baru Timur Tengah yang sesuai kebutuhan dan tujuan geo-strategis Amerika Serikat dan Israel (Republika, 2015).

4.3 Faktor Arab Saudi

Realitas baru yang terjadi di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pertimbangan politik yang diambil Donald Trump untuk mengambil keputusan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Hal ini ditengarai dengan bergesernya pandangan negara-negara Timur Tengah terhadap Isarel, khususnya bagi negara yang paling berpengaruh di Timur Tengah yakni Arab Saudi. Pada mulanya, Arab Saudi yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel tersebut turut menentang resolusi PBB tahun 1947 tentang pengakuan kedaulatan Israel, dan pembagian wilayah Palestina. Arab Saudi juga menyatakan bahwa normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel akan terwujud jika seluruh hak bangsa Palestina terpenuhi. Namun demikian, yang terjadi saat ini adalah adanya pergeseran pandangan Arab Saudi terhadap Israel. Hal ini terkait kesamaan kepentingan menyangkut poros Iran.

Peta geo-politik Timur Tengah mengalami dinamika dan perubahan yang pesat, hal ini ditandai dengan pembentukan persekutuan baru antara Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi. Momentum tersebut yang mempermudah jalan bagi Presiden Donald Trump untuk membuat keputusan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Hal tersebut juga terlihat pada saat presiden Donald Trump memutuskan mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, Arab Saudi dianggap tidak cukup vokal dalam mersepon keputusan presiden Donald Trump tersebut (CNN Indonesia, 2018).

Amerika Serikat dalam hal ini mengambil momentum yang tepat, dimana pada saat yang bersamaan Arab Saudi sebagai salah satu negara yang berpengaruh di

Timur Tengah sedang fokus melakukan manuver untuk meredam pengaruh Iran di Timur Tengah. Dari terjalinnya hubungan antara Israel dan Arab Saudi tersebut, menguntungkan Donald Trump untuk mencapai kepentingan politiknya. Beberapa capaian yang diperoleh Donald Trump dari membaiknya hubungan Arab Saudi dan Israel adalah Donald Trump dapat melaksanakan mandat konstitusinya di dalam negeri, sekaligus mengamankan gejolak akibat dari keputusan yang diambil oleh Donald Trump pasca pengakuannya terhadap wilayah Yerusalem.

Hal ini terbukti dengan respon Arab Saudi yang lebih fokus terhadap permasalahannya dengan Iran dibandingkan menentang keputusan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat, Israel maupun Arab Saudi memiliki kepentingan bersama yang menyangkut poros Iran (KOMPAS, 2018). Presiden Donald Trump berhasil merangkul pandangan strategis Arab Saudi untuk menentang kesepakatan nuklir dengan Iran. Tentu isu mengenai Iran tersebut dapat membuat persamaan persepsi antara Israel dan Arab Saudi bahwa yang dihadapi sekarang adalah bagaimana cara untuk memerangi dan memberantas pengaruh Iran di negara-negara Timur Tengah.

Pulihnya hubungan antara Arab Saudi dengan Israel merupakan keberhasilan Amerika Serikat dalam mengamankan eksistensi Israel di wilayah Timur Tengah. Meskipun Arab Saudi tidak secara eksplisit mendukung Israel, namun pernyataan yang dilontarkan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tentang persamaan kepentingan dan pendapatnya tentang Israel dan Palestina sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan wilayahnya. Selain itu jika ditinjau selama ini, sikap Arab Saudi terhadap konflik Palestina dengan Israel terkesan mendua. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dukungan politik dan diplomatik Arab Saudi terhadap Palestina. Padahal pada realitanya hal yang paling dibutuhkan Palestina selain bantuan dana adalah bantuan diplomatik, karena Arab Saudi sendiri sebagai salah satu Negara Islam yang berpengaruh dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dengan pengaruh yang dimiliki Arab Saudi tersebut seharusnya memiliki dampak terhadap perjuangan Palestina.

Arab Saudi sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Israel tersebut, juga telah mengizinkan pesawat milik penerbangan India untuk menggunakan wilayah udaranya untuk membuka jalur penerbangan langsung New Delhi-Tel

Aviv. Hal ini ditandai sebagai berakhirnya kebijakan larangan yang sudah berlaku selama puluhan tahun tentang penggunaan wilayah udara Arab Saudi tentang akses langsung ke Israel. Hal ini tentu membuka jalan Israel untuk memperkuat eksistensinya di wilayah Timur Tengah. Padahal pada realitanya masalah utama yang terjadi di wilayah Timur Tengah dimulai dengan penguasaan wilayah Palestina oleh Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Tidak adanya komitmen yang kuat dari negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi untuk menanggalkan kepentingan politik masing-masing negara tentu memberikan celah bagi Israel dan Amerika Serikat khususnya untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah dan menjadi hambatan bagi terwujudnya masa depan Kemerdekaan Palestina (Today, Pars, 2018)

BAB 5. KESIMPULAN

Konflik Palestina dengan Israel telah menjadi fokus Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Hal ini berkaitan dengan sejarah, pasca Inggris melepaskan tanggung jawab terhadap keputusannya membagi wilayah Palestina terhadap bangsa Arab dan Yahudi, dan campur tangan Amerika Serikat dalam membantu kaum Yahudi untuk meraih impiannya menegakkan negara Yahudi. Pada mulanya bantuan Amerika Serikat hanya terbatas pada bantuan moril, yakni dukungan Amerika Serikat terhadap perjanjian Balfour, yang menggambarkan keprihatinan Amerika terhadap nasib bangsa Yahudi. Namun demikian, seiring perkembangannya Amerika Serikat juga melihat keuntungan strategis dari wilayah Timur Tengah. Langkah besar yang diambil Amerika Serikat dalam mendukung bangsa Yahudi yakni dengan mengakui kedaulatan bangsa Yahudi dalam pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Selanjutnya dalam kurun waktu yang lama Amerika Serikat juga memberikan bantuan dari segi ekonomi, politik, dan militer untuk memperkuat posisi Israel di wilayah Timur Tengah.

Jika ditinjau dari segi historis kedekatan Amerika Serikat dengan Israel telah berlangsung lama, hubungan historis itu membuat kepentingan kedua negara semakin berkaitan satu sama lain. Bagi pihak Amerika Serikat sendiri kepentingan Israel telah menjelma menjadi fokus politik luar negeri Amerika Serikat khususnya di wilayah Timur Tengah. Hal ini dipengaruhi adanya lobi Yahudi yang mendominasi kancah politik Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga memanfaatkan eksistensi Israel di Timur Tengah untuk mengukuhkan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Kedekatan historis tersebut yang membuat Amerika Serikat mengimplementasikan dukungan terhadap Israel dengan membuat konstitusi yang mengatur wilayah Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Hal ini tertuang dalam Jerusalem Embassy Act tahun 1995, yang mengharuskan Amerika Serikat mengakui wilayah Yerusalem sebagai wilayah Israel. Konstitusi tersebut juga yang mendasari keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel, disertai dengan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Meskipun keputusan Donald Trump

tentang Yerusalem bertolak belakang dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, tetapi bagi Donald Trump keputusan tersebut lebih menguntungkan bagi kepentingan Amerika Serikat maupun kepentingan Donald Trump sendiri. Melalui pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat hal tersebut pada akhirnya tetap terlaksana meskipun mendapat respon negatif dari negara lain.

Kepentingan politik yang kuat untuk menjalankan konstitusi Amerika Serikat membuat Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump berusaha merealisasikan keputusan pengakuan wilayah Yerusalem tersebut. Rasionalitas Presiden Donald Trump sebagai kepala negara yang lebih mendahulukan kepentingan negara juga menjadikan keputusan tersebut sebagai keputusan kolektif Amerika Serikat. Hal ini tentu semakin memperjelas sikap tegas Amerika Serikat yang sebenarnya dalam menangani konflik Palestina-Israel. Keputusan pengakuan Yerusalem sebagai wilayah Israel juga berhubungan dengan rencana perdamaian yang akan dibuat oleh Presiden Donald Trump tentang rencana perdamaian *one state solution*. Meskipun pada dasarnya Amerika Serikat sampai saat ini masih menjadi tumpuan bagi negara Palestina dan Israel untuk merundingkan kesepakatan damai, namun agaknya dengan adanya keputusan tersebut kesepakatan damai akan mengalami hambatan kedepannya. Hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya eksistensi Israel di wilayah Timur Tengah, dan juga melemahnya legitimasi Palestina akibat tekanan yang diterima pasca keputusan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai wilayah Israel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chemerinsky, E. (2006: 48). *Constitutional Law: Principles and Policies*. United State: Aspen Publishers .

Chomsky, N. (1983: 32). *Fateful Triangle :The United States, Israel,and the Palestinians*. US: South End Press.

Hara, A. B. (2011: 86). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

Lenczowski, G. (1993: 67). *THE MIDDLE EAST IN WORLD AFFAIRS*. California: University of California at Berkeley.

M. Riza Sihbudi, M. H. (1993: 56). *Konflik Dan Diplomasi Di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco.

Mas'oeed, M. (1989 : 116). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Rancang Sampul.

Mas'oeed, M. (1990). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL : Disiplin Ilmu dan Metodologi*. Dalam *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL : Disiplin Ilmu dan Metodologi* (hal. 107). Jakarta: LP3ES.

Maulani, Z. (2003: 48). *ZIONISME : GERAKAN MENAKLUKAN DUNIA*. BANDUNG: DASETA.

Walt, S. M. (1999: 21). *Rigor or rigor mortis? Rational Choice and Security Studies*. International Security Studies.

Internet

AA. (2018). *Trump akan rampungkan 'Kesepakatan Abad Ini' dalam beberapa bulan*. Diambil kembali dari AA: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/trump-akan-rampungkan-kesepakatan-abad-ini-dalam-beberapa-bulan/1267123>[Diakses pada 28 Agustus 2018]

- AP. (2017). *US sent \$221 million to Palestinians in Obama's last hours*. Diambil kembali dari AP News: <https://apnews.com/b8446cbf5b504b1abaf49eb0d646367b>[Diakses pada 20 September 2018]
- BBC. (2017). *Yerusalem ibu kota Israel : Di balik keputusan Donald Trump*. Diambil kembali dari BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42280803>[Diakses pada 10 September 2018]
- Bloomberg. (2017). *In Trump's middle east-israel is no longer the problem*. Diambil kembali dari Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-21/in-trump-s-middle-east-israel-is-no-longer-the-problem> [Diakses pada 6 September 2018]
- CFR. (2007). *MIDDLE EAST: The Road Map to Peace*. Diambil kembali dari Council on Foreign Relation Website: <https://www.cfr.org/backgrounder/middle-east-road-map-peace>[Diakses pada 21 Juli 2018]
- CNN. (2017). *With UN vote, Trump gets what he deserves*. Diambil kembali dari CNN: <http://edition.cnn.com/2017/12/21/opinions/haley-un-vote-what-trump-deserves-john-kirby-opinion/index.html>[Diakses pada 31 Agustus 2018]
- CNN Indonesia. (2016). *Bantuan Militer Terbaru AS ke Israel Terbesar dalam Sejarah*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160914073904-134-158094/bantuan-militer-terbaru-as-ke-israel-terbesar-dalam-sejarah> [Diakses pada 20 Agustus 2018]
- (2017). *Seabad Deklarasi Balfour, Awal Pendudukan Yahudi di Palestina*. Diambil kembali dari CNN INDONESIA: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171102121910-134-252967/seabad-deklarasi-balfour-awal-pendudukan-yahudi-di-palestina>[Diakses pada 2 Juli 2018]

- . (2018). *Saudi Buka Kemungkinan Jalin Hubungan bersama Israel*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180412151327-120-290353/saudi-buka-kemungkinan-jalin-hubungan-bersama-israel>[Diakses pada 26 September 2018]
- Detik. (2017). *9 Negara Tolak Resolusi PBB Soal Yerusalem, Takut Ancaman Trump?* Diambil kembali dari DetikNews: <https://news.detik.com/internasional/d-3781082/9-negara-tolak-resolusi-pbb-soal-yerusalem-takut-ancaman-trump>[Diakses pada 11 Agustus 2018]
- . (2017). Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/3759255/akui-yerusalem-ibu-kota-israel-trump-penuhi-janji-kampanye>[Diakses pada 3 Agustus 2018]
- . (2017). *Sikap AS Terhadap Konflik Israel Palestina dari masa ke masa*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/infografis/d-3760465/sikap-as-terhadap-konflik-israel-palestina-dari-masa-ke-masa>[Diakses pada 3 Agustus 2018]
- . (2017). *Yerusalem, Sejak Nabi Daud Hingga Pengakuan Donald Trump (1)*. Diambil kembali dari DetikNews: <https://news.detik.com/infografis/d-3779463/yerusalem-sejak-nabi-daud-hingga-pengakuan-donald-trump-1> [Diakses pada 10 Juli 2018]
- Foreign policy. (2018). *The Untold Story of the Jerusalem Embassy Act*. Diambil kembali dari Foreign policy web site: <https://foreignpolicy.com/2018/05/11/the-untold-story-of-the-jerusalem-embassy-act-of-1995/>[Diakses pada 16 Juni 2018]
- Government, U. C. (1995). JERUSALEM EMBASSY ACT 1995. Diambil kembali dari Public Law 104–45: <https://www.congress.gov/104/plaws/pub45/PLAW-104pub45.pdf> [Diakses pada 5 September 2018]

- IMEU. (2005). *What did, in fact, happen at Camp David in 2000?* Diambil kembali dari IMEU Website: <https://imeu.org/article/what-did-in-fact-happen-at-camp-david-in-2000>[Diakses pada 14 Agustus 2018]
- JAWAPOS. (2017). *Berang soal Resolusi Yerusalem, AS Potong Anggaran PBB.* Diambil kembali dari JAWAPOS : <https://www.jawapos.com/read/2017/12/28/177786/berang-soal-resolusi-yerusalem-as-potong-anggaran-pbb>[Diakses pada 3 Juni 2018]
- JPOST. (2016). *ADELSON TO REPUBLICAN JEWISH LEADERS: SUPPORT TRUMP.* Diambil kembali dari The Jerusalem Post: <https://www.jpost.com/US-Elections/Sheldon-Adelson-backs-Donald-Trump-says-hes-good-for-Israel-453328>[Diakses pada 9 November 2018]
- Kompas. (2012). *Dari Camp David hingga Perjanjian Oslo.* Diambil kembali dari KOMPAS: <http://internasional.kompas.com/read/2012/11/30/0645155/Dari.Camp.David.hingga.Perjanjian.Oslo> [Diakses pada 20 Agustus 2018]
- (2017). *Kontroversi Jerusalem.* Diambil kembali dari Kompas: <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171211/281651075447515>[Diakses pada 2 November 2018]
- (2018). *Pangeran MBS: Arab Saudi dan Israel Punya Kepentingan yang Sama.* Diambil kembali dari Kompas: <https://internasional.kompas.com/read/2018/04/03/19090181/pangeran-mbs-arab-saudi-dan-israel-punya-kepentingan-yang-sama> [Diakses pada 22 Juni 2018]
- MEE. (2016). *No matter who wins the US election, the door stays shut to Palestinians.* Diambil kembali dari Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/essays/no-matter-who-wins-us-election-door-stays-shut-palestinians-1051321472>[Diakses pada 7 September 2018]
- Napolitano, P. (2012). *JERUSALEM: THE HEART OF THE ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT.* Belgium : EUROPEAN PARLIAMENT. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491443/EXPO-AFET_SP%282012%29491443_EN.pdf . [Diakses pada 7 September 2018]

- New York Times. (1999). *At Border, Arafat and Barak Meet to Build Road to Peace*. Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/1999/07/12/world/at-border-arafat-and-barak-meet-to-build-road-to-peace.html>[Diakses pada 3 Juli 2018]
- Republika. (2015). *AS-Israel Berencana Bentuk Peta Baru Timur Tengah*. Diambil kembali dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/07/nvt7d313-asisrael-berencana-bentuk-peta-baru-timur-tengah>[Diakses pada 20 September 2018]
- Sindo News. (2017). *Tunaikan Janji soal Yerusalem, Trump Ledek Clinton, Bush dan Obama*. Diambil kembali dari Sindo News: <https://international.sindonews.com/read/1263994/42/tunaikan-janji-soal-yerusalem-trump-ledek-clinton-bush-dan-obama-1512720129>[Diakses pada 26 September 2018]
- The Independent US. (2018). *Pence faces complicated trip to Middle East in wake of Trump Jerusalem decision*. Diambil kembali dari The Independent US: <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-jerusalem-pence-visit-israel-jordan-egypt-protests-embassy-capital-a8169036.html>[Diakses pada 8 Juli 2018]
- The Guardian. (2016). *US abstention allows UN to demand end to Israeli settlements*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/23/us-abstention-allows-un-to-demand-end-to-israeli-settlements> [Diakses pada 23 Juli 2018]
- (2017). *Israel-Palestine: the real reason there's still no peace*. Diambil kembali dari The Guardian website: <https://www.theguardian.com/world/2017/may/16/the-real-reason-the-israel-palestine-peace-process-always-fails>[Diakses pada 4 Agustus 2018]
- The Washington Post. (2017). *In 1995, Congress reached a compromise on the issue of Jerusalem. Trump is poised to end it*. Diambil kembali dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995-congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-is-poised-to-end-it/?utm_term=.44cfd6904a63 [Diakses pada 29 Mei 2018]

----- (2019). *The Washington Post*. Diambil kembali dari Washington Post: https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/01/14/brittle-foundation-trumps-middle-east-policy/?utm_term=.626adc721bb1 [Diakses pada 15 Januari 2018]

Today, Pars. (2018). Tantangan Keamanan Asia Barat. Diambil kembali dari Pars Today: http://parstoday.com/id/radio/middle_east-i51923-tantangan_keamanan_asia_barat [Diakses pada 9 November 2018]